



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KELAS LAYANAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA
(STUDI KASUS PADA SD NEGERI DUPAK I DAN
SD NEGERI BANYU URIP III/364)**

TESIS

WAHYU HARYADI

0906589671

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**JAKARTA
NOVEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KELAS LAYANAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA
(STUDI KASUS PADA SD NEGERI DUPAK I DAN
SD NEGERI BANYU URIP III/364)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

WAHYU HARYADI

0906589671

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**JAKARTA
NOVEMBER 2011**

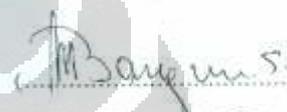
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

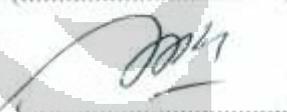
Nama : Wahyu Haryadi
 NPM : 0906589671
 Program Studi : Adminitrasi dan Kebijakan Pendidikan
 Judul Tesis : Evaluasi Program Pendidikan Sekolah Dasar Kelas
 Layanan Khusus di Kota Surabaya (Studi Kasus pada SD
 Negeri Dupak I dan SD Negeri Banyu Urip III/364)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu 

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ 

Penguji : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA 

Sekretaris : Dr. Haula Rosdiana, M.Si 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 November 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Wahyu Haryadi

NPM : 0906787671

Tanda Tangan

Tanggal : 14 November 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, kenikmatan dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai awal masa perkuliahan sampai ke penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag. rer.publ yang telah dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan dalam hingga selesainya penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu, Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA dan Dr. Haula Rosdiana, M.Si selaku Tim Penguji.
3. Seluruh dosen dan staff sekretariat Program Pasca Sarjana Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang telah banyak membantu dalam memberikan tambahan ilmu dan wawasan.
4. Ibu Eko Prastyoningsih, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Hari Prasetyo Hadi, Kepala Sekolah SDN Dupak I, Ibu Sri Utami, Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364 beserta jajaran guru pengajar KKK maupun guru non KKK yang telah memberikan waktu berharganya demi penyelesaian tesis ini.
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa mengenyam dan menyelesaikan pendidikan S2.
6. Istri saya Haniva Haryadi dan ketiga anak saya, Attar Zulva Reksa Soemarta, Nailan Alisha Keira Andjani dan Keenan Rhieva Reksa Soemarta atas pengertian, kepercayaan, kasih sayang dan dukungan doanya.

7. Keluarga Besar Reksa Soemarta, Kakak-kakak, keponakan yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
8. Rekan-rekan di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang telah memberikan doa dan dukungan.
9. Rekan-rekan di kelas pendidikan angkatan II.
10. Rekan-rekan sesama bimbingan tesis yang selalu saling mendukung.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat saya bisa menyelesaikan tesis yang sangat sederhana ini. Semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi yang memerlukannya.

2011

Jakarta, 14 November

Penulis

(Wahyu Haryadi)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Haryadi
 NPM : 0906589671
 Program Studi : Ilmu Adminitrasi dan Kebijakan Pendidikan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jenis Karya : Tesis

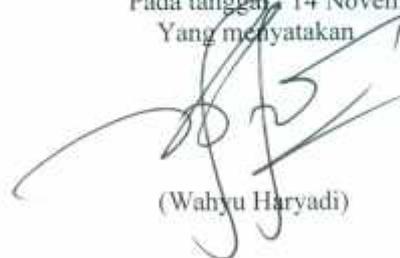
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ Evaluasi Program Pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya (Studi Kasus pada SD Negeri Dupak I dan SD Negeri Bayu Urip III/364) “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

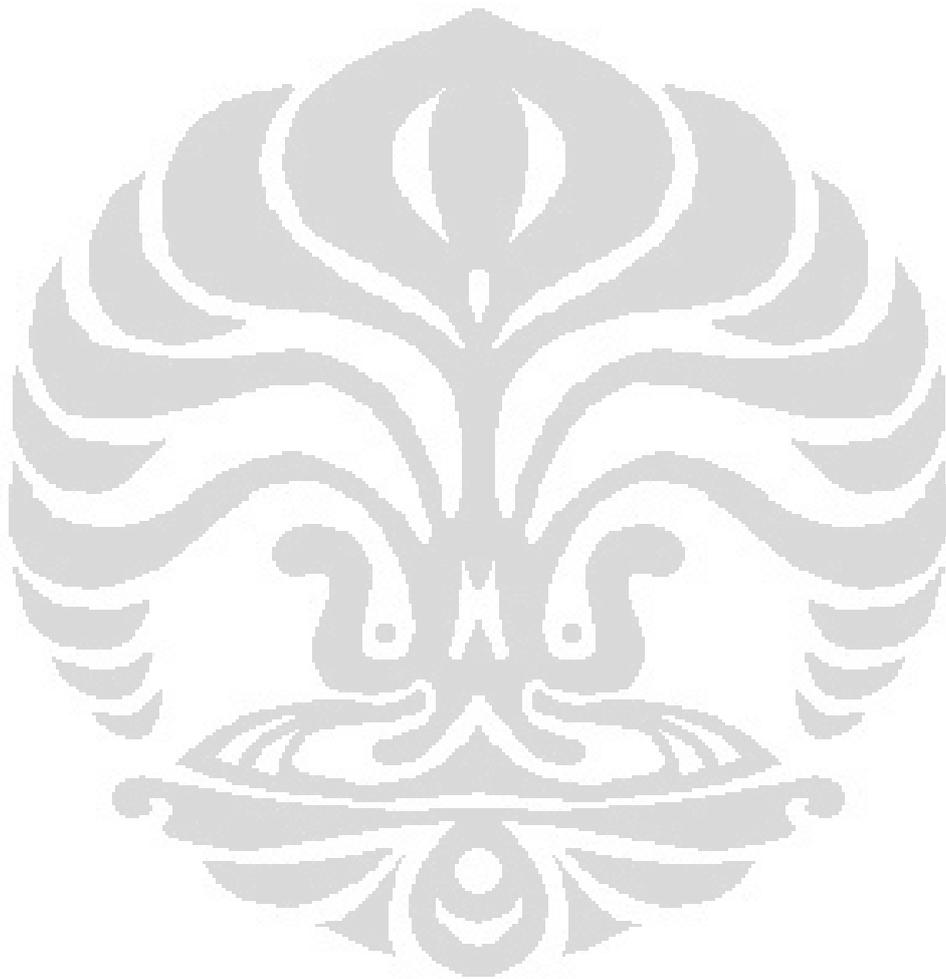
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
 Pada tanggal : 14 November 2011
 Yang menyatakan



(Wahyu Haryadi)

| | | |
|--------------|---|------------|
| BAB 3 | METODE PENELITIAN..... | 28 |
| 3.1 | Pendekatan Penelitian..... | 28 |
| 3.2 | Jenis Penelitian..... | 32 |
| 3.3 | Jenis Data..... | 28 |
| 3.3.1 | Data Primer..... | 28 |
| 3.3.2 | Data Sekunder..... | 29 |
| 3.4 | Tempat dan Waktu Evaluasi..... | 28 |
| 3.5 | Metode Pengumpulan Data..... | 29 |
| 3.6 | Teknik dan Analisa Data..... | 31 |
| | | |
| BAB 4 | GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KELAS LAYANAN KHUSUS..... | 32 |
| 4.1 | Profil Kota Surabaya..... | 32 |
| 4.2 | Profil Sekolah..... | 35 |
| 4.2.1 | SDN Banyu Urip III/364..... | 35 |
| 4.2.2 | SDN Dupak I..... | 37 |
| 4.3 | Program SD KLK..... | 39 |
| 4.3.1 | Pendekatan Dasar Program SD KLK..... | 39 |
| 4.3.2 | Tujuan dan Sasaran Program SD KLK..... | 40 |
| 4.3.3 | Pendekatan Pembelajaran..... | 44 |
| 4.3.4 | Berbagai Pendekatan dalam Pembelajaran..... | 49 |
| 4.3.5 | Pelaksanaan Pembelajaran KLK..... | 55 |
| | | |
| BAB 5 | PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..... | 65 |
| 5.1 | Hasil Penelitian..... | 65 |
| 5.2 | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 94 |
| 5.2.1 | Sosialisasi..... | 95 |
| 5.2.2 | Rekrutmen Siswa..... | 95 |
| 5.2.3 | Dana Bantuan..... | 95 |
| 5.2.4 | Kurikulum..... | 96 |
| 5.2.5 | Tingkat Keberhasilan..... | 96 |
| 5.2.6 | Hambatan..... | 97 |
| | | |
| BAB 6 | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 99 |
| 6.1 | Kesimpulan..... | 99 |
| 6.2 | Saran..... | 101 |
| | | |
| | DAFTAR REFERENSI..... | 103 |
| | LAMPIRAN..... | 112 |



ABSTRAK

Nama : Wahyu Haryadi
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Judul Tesis : Evaluasi Program Pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya (Studi Kasus pada SD Negeri Dupak I dan SD Negeri Banyu Urip III/364)

Wajib belajar 9 tahun adalah salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah menargetkan anak usia 7-15 tahun harus bersekolah. Fakta yang ada adalah masih banyak masyarakat yang tidak dapat bersekolah di jenjang pendidikan dasar karena alasan ekonomi dan bahkan kemudian menjadi pekerja jalanan. Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (KLK) adalah salah satu dari program pemerintah yang ditujukan memberi kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah. Program ini sudah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia dengan menggunakan dana APBN, hanya kota Surabaya yang bisa melaksanakan dengan menggunakan dana APBDnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung yang ada di Kota Surabaya sehingga program SD KLK ini bisa di laksanakan dengan baik . Program SD KLK di dua SD sampel di Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD ini juga bisa mengembalikan anak yang putus sekolah sebanyak 60 anak dan 30% diantaranya bias dikembalikan ke kelas regular. Diharapkan program ini bisa dikembangkan ke Kabupaten/Kota lain dengan menggunakan dana APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Pendidikan Dasar, Putus Sekolah, Kelas Layanan Khusus,

ABSTRACT

Namae : Wahyu Haryadi
Study Program : Special Aspects of Administration and Education Policy
Tittle : Evaluation of Special Education Service at Primary School.
(Case Study at Dupak I and Banyu Urip III/364 Primary Schools in Surabaya)

Nine year compulsory basic education is one of the priorities programme in Indonesia. The government targeted that all children age 7-15 years should go to school. In fact, many children are drop out and lives in the street due to economic problem. Special education service through providing special class is a program to enroll the street children in accessing education. This has been implementing in several districts including Surabaya City, the only district who provided local budget to support this program. This research aims to describe the implementation of the special class services at Dupak I and Banyu Urip III/364 primary schools in Surabaya. It is found that these schools succeed to enroll 60 out of school children and about 30% of them has been joined to the regular classes. It is recommended that this program could be implemented broader and supported by local governments.

Keywords: Basic Education, Drop Out, Special Class Service

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

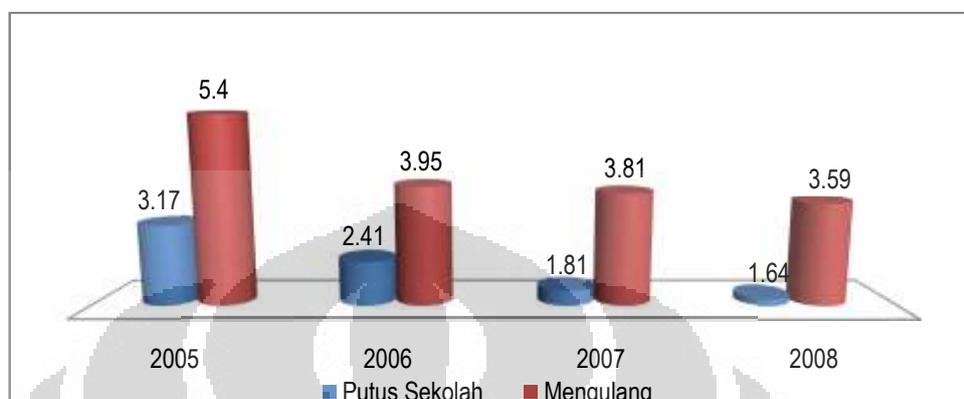
Salah satu kebijakan Bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia tertuang dalam “Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa ”*untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial*” (Buku II Persandingan UUD 1945, Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004, hal. 4)

Dan salah satu kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapat layanan pendidikan. Selain itu akibat krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia, telah menimbulkan dampak pada peningkatan jumlah anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan Sekolah Dasar karena alasan ekonomi.

Beberapa alasan lain terjadinya kurangnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan antara lain adalah anak-anak harus membantu orang tua mencari nafkah. Data Pusat Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional (2009) menunjukkan angka putus sekolah jenjang SD sebesar 475.145, atau sebesar 1,81 %. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014, target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2014 adalah turunya angka putus sekolah jenjang sekolah dasar menjadi hanya 0,7%.

Grafik 1

Angka Mengulang dan Putus Sekolah Dasar Tahun 2005 – 2008



Sumber: PSP Kemdiknas, 2009

Kebijakan dan upaya-upaya untuk menangani masalah putus sekolah telah menjadi perhatian dunia, dengan adanya seruan UNESCO yang disepakati dalam Kerangka Aksi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Educational For All (EFA)* tahun 2000. Deklarasi Dakar berisi enam tujuan PUS/EFA yang meliputi:

1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai.
4. Mencapai perbaikan 50% tingkat melek aksara bagi orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan

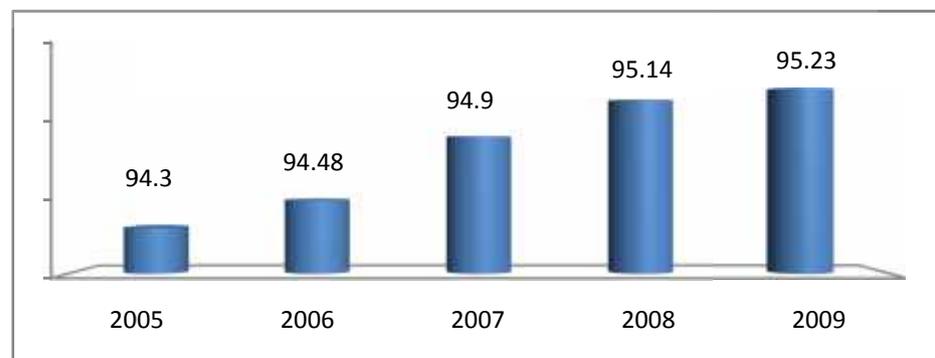
menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.

6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting.

Pemerintah Indonesia memfokuskan pada tercapainya pemerataan dan perluasan pendidikan yang bermutu agar dapat menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, termasuk anak perempuan, anak-anak yang kurang beruntung dan minoritas etnik, mempunyai akses yang sama dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. Hal ini didukung oleh UUD 1945 dengan jiwa pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Begitu juga seperti tercantum dalam UU No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5 yang berisi bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, serta UU No. 20 tahun 2003, tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Semua itu merupakan berbagai usaha pemerintah untuk memberikan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak. Pencanaan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sebagai komitmen pemerintah terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan. Program penuntasan wajib belajar 9 tahun ditargetkan tuntas pada tahun 2008, dengan target pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Dasar sebesar 99.9%.

Grafik 2.

APM SD/SDLB/MI/Paket A/Sederajat Tahun 2005 - 2009



Sumber: PSP Kemdiknas, 2009

Angka Partisipasi Murni merupakan akumulasi dari partisipasi anak usia 7 – 12 tahun pada semua jenis pendidikan di sekolah dasar, yaitu SD, MI, SDLB, pondok pesantren Salafiyah Ula, dan Paket A.

Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/MI/ Paket A/Sederajat secara nasional meningkat dari 94.30% pada tahun 2005 menjadi 95.23% pada tahun 2009. Pencapaian APM ini telah melampaui target yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yaitu sebesar 95% namun belum bisa mencapai target APM 99,9% pada tahun 2008.

Dalam rangka pencapaian target tersebut, sebagai upaya pemenuhan akses dan pemerataan kesempatan belajar telah dilakukan melalui penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan sekolah dasar yang memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak. Salah satu upaya tersebut adalah memaksimalkan penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan melalui Kelas Layanan Khusus. (Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, hal 50)

Tabel 1
Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SD/SDLB

| No. | Program | Tahun | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Jumlah ruang kelas yang rusak | 465.356 (46,62%) | 393.247 (39,40%) | 299.378 (29,99%) | 201.856 (20,22%) | 88.155 (9,89%) |
| 2 | Penerima Beasiswa Siswa Prestasi dan Beasiswa Siswa Miskin | 70.000 | 53.920 | 52.171 | 698.570 | 1.796.800 |
| 3 | BOS *) | 3,394**) | 6,832**) | 6.617 | 6.823 | 10.682 |
| 4 | Siswa Peserta KLK | 675 | 1.145 | 1.895 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | Pembinaan SD Terpencil | 66 | 66 | 66 | 66 | - |

Catatan: *) Trilyun rupiah; **) Termasuk MI dan Salafiyah Ula

Sumber: Direktorat Pembinaan TK dan SD Kemdiknas, 2009

Sebagai aplikasi Kelas Layanan Khusus (KLK), maka Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan suatu model layanan pendidikan untuk menangani anak-anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah yang disebut dengan Program Kelas Layanan Khusus (KLIK) di Sekolah Dasar. Program ini dilahirkan dari hasil studi pendahuluan pada tahun 2002 di berbagai kota besar di Indonesia oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, yaitu: Universitas Terbuka, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2003 program Kelas Layanan Khusus mulai diujicobakan di 15 Kota, yaitu: Medan, Palembang, Serang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, dan Makasar. Pemilihan kota-kota tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa: (a) kota-kota tersebut merupakan kota-kota besar yang terdapat banyak kaum urban mengadu nasib; (b) kota-kota tersebut telah dikaji dan hasilnya menunjukkan terdapat banyak anak-anak usia SD yang putus sekolah serta telah dipetakan keberadaannya untuk ditangani; (c) Angka Partisipasi Murni jenjang SD di kota-kota tersebut menunjukkan angka yang masih rendah. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif layanan pendidikan yang handal dalam rangka menjangkau jutaan anak-anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah.

Karena keterbatasan anggaran dana, maka Kementerian Pendidikan Nasional mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus dengan didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, upaya itu pernah dilakukan dengan mengundang Bappeda Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan program pembelajaran SD KLIK pada acara Workshop SD KLIK di Bali pada tahun 2006. Namun hingga saat ini baru Kota Surabaya yang bisa melaksanakan model pembelajaran SD Kelas layanan Khusus menggunakan dana APBDnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program KLIK di Kota Surabaya yang menggunakan dana APBD, perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Oleh sebab itu proposal ini diajukan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KLIK bagi anak usia 7-12 tahun di Sekolah Dasar Negeri di

Kota Surabaya yang menggunakan dana APBD. Dalam pelaksanaannya program KLK memiliki banyak komponen yang terkait, komponen-komponen tersebut antara lain: (1) Proses belajar mengajar; (2) Guru; (3) Peserta didik; (4) Metode mengajar; (5) Kurikulum; (6) Media pembelajaran; (7) Evaluasi belajar. Untuk menghasilkan evaluasi yang sesuai dengan permasalahan dalam program KLK, maka masalah evaluasi dibatasi pada: (1) jenis evaluasi program menggunakan model CIPP, yang meliputi kajian tentang *Contexts, Inputs, Process, dan Product*. Model CIPP ini digunakan untuk memfokuskan dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang efektifitas penyelenggaraan program Kelas Layanan Khusus (KLK); (2) objek penelitian dibatasi pada penyelenggaraan program KLK di Kota Surabaya yang menggunakan dana APBD; (3) jangka waktu pelaksanaan evaluasi dibatasi pada penyelenggaraan program KLK periode tahun 2007-2009.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka masalah penelitian dirumuskan sesuai pendekatan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas) pemerintah harus mampu menjamin semua anak Indonesia di usia 7 – 15 tahun agar bisa bersekolah. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan program pendidikan kelas layanan khusus di Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD, sejauh mana program ini berdampak atau minimal memberikan kontribusi bagi penuntasan

Wajar Dikdas maupun penuntasan angka putus sekolah, sehingga penulis dapat mengetahui :

1. Mengevaluasi sejauh mana program pendidikan ini terhadap penuntasan program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
2. Mengevaluasi implementasi program dari segi perencanaan program, strategi pelaksanaannya dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program,

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil evaluasi program ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian secara akademis, sosial dan praktis :

1. Manfaat Akademis

Penulis berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademik mengenai pemahaman tentang program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya program pendidikan kelas layanan khusus.

2. Manfaat Praktis

Penulis berupaya memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam pengentasan angka putus sekolah maupun angka penuntasan wajib belajar sembilan tahun sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tidak ada anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah maupun putus sekolah. Penulis berupaya memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pendidikan kelas layanan khusus, khususnya di Kota Surabaya kepada masyarakat agar lebih paham sekaligus juga bisa membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak *drop out* untuk melanjutkan pendidikan di tingkat dasar dan memperkuat komitmen orang tua dalam tanggungjawab pendidikan bagi anak-anaknya

Penulis juga berupaya bisa memberikan umpan balik bagi berbagai stakeholders tentang dampak pelaksanaan program serta sebagai dasar perencanaan untuk program selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori tentang Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan bersama, untuk itu maka kebijakan publik harus dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya istilah kebijakan sudah biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, namun penggunaannya untuk mengganti kegiatan atau keputusan yang berbeda-beda (Charles O Jones, 1984, p.25)

Secara umum pengertian kebijakan publik dikemukakan oleh James A. Anderson (1978, p. 3) yakni *“Public policies are those developed by governmental bodies and officials”*. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Sedangkan menurut Dye (1972, p.1) bahwa kebijakan publik adalah *“whatever governments choose to do or not to do”*, atau dalam pengertian lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Dunn (1994, p.1), yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah *“a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made by governmental bodies and official”*. Pengertian Dunn dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengedepankan berbagai hal dengan berdasarkan pola-pola yang bersifat kolektif, kompleks, dan saling ketergantungan, dilakukan tidak hanya oleh pejabat pemerintah, melainkan juga oleh lembaga pemerintah secara keseluruhan. Demikian juga Easten (1953, p.129) yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai: *the authoritative allocation of values for the whole society”*.

Berbeda dengan Dunn dan Easten, Gerston (1992, p. 5), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah *“an attempts to resolve public issues, question that most people believe should be decide by officials at the appropriate level of government national, state or local”*. Pendapat Gerston tentang kebijakan publik lebih menekankan kepada upaya-upaya yang diputuskan oleh pejabat pemerintah pada setiap

tingkatan pemerintahan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Parker (1975,p.70), bahwa kebijakan publik adalah “suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam periode tertentu berkaitan dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap suatu krisis”.

Sementara Lasswell and Kaflan (1970, p.71) mendefinisikan kebijakan sebagai: “*a projected program of goals, values, and practices*”, dan menurut Friedrich (1963, p.70) bahwa “*it is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purposes*”. Definsi yang lebih lengkap dikemukakan oleh William Jenkins dalam bukunya *Policy Analylsis: A Political and Organization Perspective* yang dikutip Howlett and Ramesh (1995, p.5) bahwa kebijakan publik sebagai “*a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principal, be within the power of those actors to achieve*”.

Jones (1984, p. 47) yang mengutip pendapat Eula dan Prewitt, berpendapat hampir senada dengan Gerston dengan mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Jika Eula dan Prewitt memahami kebijakan penekanannya kepada keputusan-keputusan itu sendiri, Edward III dan Sharkansky (1978, p. 23) berbeda. Dikemukakan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan dan maksud yang jelas dan merupakan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan.

Nakamura dan Smallwood(1980, p. 31) hampir senada dengan Eula dan Prewitt, mengemukakan bahwa kebijakan public adalah “serangkaian instruksi kepada para pembuat kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”. Demikian juga Pressman dan Wildavsky (1984, p. xxii) berpendapat bahwa kebijakan sebagai: *a hypothesis containing initial condition and predicted consequences*”. Dengan kata lain, kebijakan public merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Secara umum, dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan bahwa pandangan mengenai kebijakan publik terbagi ke dalam Dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang memandang kebijakan publik sebagai suatu tindakan atau apa-apa yang sebenarnya dilakukan; *Kedua*, kelompok yang menekankan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan.

Pendapat yang pertama memberikan penekanan makna terhadap kebijakan sebagai tindakan seorang pejabat atau penguasa, kelompok, lembaga atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu untuk tujuan tertentu dalam urusan publik. Para ahli yang berada pada kelompok ini di antaranya Anderson, Parker, Gerston. Sedangkan kelompok kedua yang memandang kebijakan publik sebagai rangkaian atau rumusan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para aktor perumus kebijakan. Para pakar kebijakan publik yang berada pada kelompok ke dua di antaranya Easton, Dunn, Dye, Sharkansky, dan Pressman and Wildavsky. Pandangan kedua ini lebih memfokuskan perhatiannya terhadap rumusan keputusan-keputusan yang memiliki tujuan tertentu dan maksud-maksud tertentu serta mempunyai akibat-akibat yang dapat diramalkan (*Predictable impacts*).

Dengan demikian, dari beberapa pendapat pakar kebijakan publik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang dibuat oleh individu, lembaga atau pemerintah mengenai urusan publik untuk mengarahkan tindakan yang mempunyai tujuan, sasaran, dan maksud tertentu sebagai upaya mengatasi permasalahan publik agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan publik yang sudah di rumuskan harus diikuti dengan implementasinya dengan baik. Implementasi kebijakan ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Riant Nugroho, 2009).

Implementasi kebijakan merupakan bagian terbesar dari suatu proses kebijakan, sehingga apabila implementasi kebijakan tersebut dinyatakan berhasil maka dapat dikatakan kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil. George Edward III (1980,1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya lagi *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out succesfully*. Edward juga menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan

menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*.

Model implementasi kebijakan yang paling klasik adalah model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Model implementasi kebijakan yang lain adalah model Merilee S. Grindle (1980). Dikemukakan oleh Wibawa (1994,22) model Grindle ditentukan oleh *isi kebijakan dan kontek implementasinya*. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Faktor- faktor implementasi kebijakannya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini jika kita cermati adalah merupakan yang paling komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin bisa terjadi

diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dari semua uraian diatas tentang implementasi kebijakan penulis akan menggunakan model Grindle karena model Grindle inilah yang paling sesuai dalam meneliti model pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya. Faktor pembuat kebijakan, manfaat yang akan diambil, kepentingan kemajuan pendidikan di Kota Surabaya, kepatuhan sekolah dalam melaksanakan program pendidikan kelas layanan khusus ini menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan SD Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya sebagai upaya untuk menurunkan angka putus sekolah, ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan untuk semua (*education for all*)

2.2 Teori Tentang Kelas Layanan Khusus

Program Kelas Layanan Khusus (KLLK) pada dasarnya merupakan suatu pendidikan khusus. Dimana pendidikan khusus sering diidentikkan dengan pendidikan bagi anak berkelainan, yang dilaksanakan secara khusus. Istilah pendidikan berkelainan berdasarkan berbagai literatur digolongkan dalam pendidikan yang memiliki bakat luar biasa atau penyandang cacat. Beberapa ahli psikologi pendidikan telah banyak memberikan istilah pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan, seperti model pendidikan inklusif atau model pendidikan segregatif. Pendidikan bagi anak berkelainan selama ini diselenggarakan secara khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB meliputi satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Luar Biasa.

Peningkatan perhatian terhadap anak berkelainan dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada anak berkelainan bersekolah di sekolah umum, dan belajar bersama-sama anak normal disertai dengan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka, yang dikenal dengan

istilah pendidikan inklusif. Sehingga anak berkelainan di samping dapat mengikuti pendidikan di SLB, dapat pula mengikuti pendidikan inklusif di sekolah umum. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menyatakan bahwa pendidikan khusus (dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional istilah pendidikan khusus disebut dengan istilah pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan untuk peserta didik berkelainan yang diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (anak normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat, anak berkelainan akan hidup bersama-sama anak lainnya, yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, melalui pendidikan inklusif anak berkelainan sedini mungkin diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan anak-anak lainnya.

William Stainback mengemukakan dalam bukunya (*Contraversial Issues Confronting Special Education* 1992:29) bahwa yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Para guru dalam sekolah khusus harus dapat memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh para siswa berkebutuhan khusus sehingga para siswa dapat mengikuti pendidikan yang layak tetapi tetap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa.. Sekolah khusus juga merupakan tempat dimana seharusnya setiap anak dapat diterima sebagai bagian dari kelas, sehingga siswa dapat saling membantu dengan guru dan teman sebayanya.

Sedangkan Staub dan Peck dalam bukunya (*Education Leadership :1995;36-40*) mengemukakan secara lebih lanjut bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Percampuran antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal (regular) diharapkan justru dapat mempercepat penormalan proses belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kelas reguler

merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. dan bagaimanapun gradasinya.

Secara lebih tegas Sapon-Shevin dalam O'Neil (1995: p. 7-11) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Untuk itu diperlukan adanya restrukturisasi sekolah, agar lingkungan sekolah dapat menjadi lingkungan yang dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Penelitian yang berskala besar dipelopori oleh the *National Academy of Sciences* (Amerika Serikat) Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat, yang betul-betul dapat menentukan anak berkelainan yang tergolong berat (Heller, Holtzman & Messick, (1982) dalam Sunardi, (2002: p 8-9) Namun, beberapa pakar mengemukakan sangat sulit untuk melakukan identifikasi anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1995; p. 33-35). Beberapa peneliti kemudian melakukan meta-analisis lebih lanjut terhadap beberapa hasil penelitian yang telah ada dan beberapa hasil penelitian sejenis. Hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian; oleh Wang dan Baker (1994/1995) terhadap 11 buah penelitian; dan oleh Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya. Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model pendidikan khusus yang lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa *pendidikan inklusif* sama dengan *mainstreaming*, seperti pendapat Vaughn, Bos & Schumn.(2000). =

Sesuai berbagai pendapat tentang pendidikan khusus, maka dengan demikian, pendidikan khusus tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusif penuh), karena sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusif lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

2.3 Pendekatan Evaluasi

Pada dasarnya banyak model evaluasi program yang dikenalkan para pakar evaluasi. Dalam evaluasi program pendidikan, banyak model yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi suatu program. Walaupun antara satu dengan lainnya berbeda, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program.

Evaluasi program yaitu evaluasi yang menafsir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan pada suatu dasar kontinyu dan sering melibatkan tawaran-tawaran kurikulum (Joint Committe, 1991, p. 13) Berbagai metode evaluasi telah muncul, hal ini memberikan beberapa pilihan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Metode yang dipilih hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat Pravus dan Stufflebeam. memperkenalkan beberapa variasi metode dalam evaluasi, disamping desain eksperimen dan kuasi eksperimen yang tradisional dengan metode naturalistic (Guba dan Lincoln, Paton), Jury Trials dengan analisis system, dan banyak lainnya merupakan metode yang sudah lazim dipakai dalam banyak evaluasi. (Farida Yusuf Tayibnapi, h.7) Model evaluasi ialah model desain evaluasi yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya. Model-model ini dianggap model standar atau

dapat dikatakan merek standar dari pembuatannya. Disamping itu ada ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekanannya atau dapat juga disebut sesuai dengan faham yang dianutnya, yang disebut pendekatan, atau approach. Evaluasi juga dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya, kapan evaluasi dilakukan, untuk apa evaluasi dilakukan, dan acuan serta paham yang dianut oleh evaluator. Banyak sekali model evaluasi yang biasa digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan, penulis akan mengemukakan beberapa model yang populer serta banyak dipergunakan orang dalain pelaksanaan evaluasi program than diantaranya.

2.3.1 Model Evaluasi CIPP

Stufflebeam (Stufflebeam & Shinkfield) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan (*adecision oriented evaluation approach structured*) untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi "suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. (Stufflebeam & Shinkfield, p. 127). Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu:

2.3.1.1 Context evaluation to serve planning decision.

Konteks evaluasi ini merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan ruinasan tujuan program. Pada fase ini evaluator membuat dan menentukan sejauh mana batasan-batasan dan tujuan apa yang akan dicapai dari program ini. Terutama yang berkaitan dengan program KKK di Sekolah Dasar.

2.3.1.2 Input evaluation, structuring decision.

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.

Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Pada fase ini evaluator berusaha untuk mengungkap sumber-sumber data yang ada dalam upaya pencapaian tujuan dari evaluasi itu. Dimana nantinya hasil dari evaluasi dapat membantu memberikan masukan dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan program yang akan dilaksanakan.

2.3.1.3 *Process evaluation, to serve implementing decision*

Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah ditetapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan itu terdjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki. Pada fase ini evaluator hendaknya dapat mengungkapkan sejauh mana implementasi program itu telah diterapkan dilapangan dan upaya apa yang dapat ditempuh agar dapat membantu pengambil keputusan untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan.

2.3.1.4 *Product evaluation to serve recycling decision.*

Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? Pada fase ini evaluator mengungkapkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan memberikan masukan tentang upaya apa yang akan diambil sebagai tindak lanjut dari program yang telah berjalan tersebut.

Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP, model ini terkenal dengan nama model CIPP oleh Stufflebearn.

2.3.2 Model Evaluasi UCLA

Alkin menulis tentang, kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat mngumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuatan keputusan dalam memilih berbagai alternatif Ia mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:

- 1) *System assessment*, memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- 2) *Programm planning*, membantu pemulihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- 3) *Programm implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan.
- 4) *Programm improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau bedakan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
- 5) *Programm certification*, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program

2.3.3 Model Brinkerhoff

Setiap desain evaluasi umumnya terdiri atas elemen-elemen yang sama, ada banyak cara untuk menggabungkan elemen tersebut, masing-masing ahli atau evaluator mempunyai konsep yang berbeda dalam hal ini. Brinkerhoff & Cs (1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lainnya, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut:

- 1) *Fixed vs Emergent Evaluation design*. Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan?
- 2) *Formatif vs Summatif Evaluation*. Apakah evaluasi akan dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program? Atau keduanya?
- 3) *Eksperimental and Quasi Eksperimental Design vs Natural and Unobtrusive Inquiry*. Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi kedalam kegiatan program/mencoba memanipulasi kondisi, orang diperlakukan, atau hanya diamati, atau keduanya?

2.3.4 Model Stake atau Model Countenance

Stake, analisis proses evaluasi yang ditemukannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *Description* dan *Judgment* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan yaitu: *Antecedents (Context)*, *Transaction (Process)*, dan *Outcomes (Output)*.

Matrix Description menunjukkan *Intens (Goals)* dan *Observation (Effects)* atau yang sebenarnya terjadi. *Judgement* mempunyai dua aspek yaitu *Standard* dan *Judgement*.

Stake mengatakan apabila kita menilai suatu program pendidikan kita, melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lain atau perbandingan yang absolut (satu program dengan standar). Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *Judgement* atau menilai. Dalam model ini *antecedens* (masukan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program. Stake mengatakan bahwa tak ada evaluasi dapat diandalkan apabila tidak dinilai.

Pendekatan evaluasi dipakai untuk memberikan petunjuk bagaimana memperoleh informasi yang berguna dalam beberapa kondisi. Semua pendekatan paling tidak mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memperoleh informasi yang berarti atau tepat untuk klien atau pemakai. Namun masing-masing dalam usahanya berbeda penekanan pada aspek tertentu dalam tahap pengumpulan data, analisis, dan laporannya.

2.3.4.1 Pendekatan Experimental

Yang dimaksudkan dengan pendekatan eksperimental yaitu evaluasi yang berorientasi pada penggunaan experimental science dalam proses evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam evaluasi akademik. Tujuan evaluator adalah untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak-banyaknya factor dan mengisolasi pengaruh program. Evaluator berusaha sekuat tenaga menggunakan metode saintifik sebanyak mungkin.

2.3.4.2 Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Cara yang paling logis untuk merencanakan suatu program yaitu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus dan membentuk kegiatan program untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang sama juga diperoleh pada orientasi tujuan pada evaluasi. Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Evaluator mencoba mengukur sampai dimana pencapaian tujuan telah dicapai.

Pendekatan evaluasi semacam ini merupakan pendekatan yang amat wajar dan praktis untuk desain dan pengembangan program. Model ini memberi petunjuk kepada pengembangan program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dan hasil yang dicapai. Peserta tidak hanya harus menjelaskan hubungan tersebut di atas, tetapi juga harus menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian ada hubungan yang logis antara kegiatan, hasil dan prosedur pengukuran hasil.

2.3.4.3 Pendekatan yang berfokus kepada keputusan (*The Decision Focused Approach*)

Pendekatan evaluasi yang berfokus pada keputusan menekan pada peranan informasi yang sistematis untuk mengelola program dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan pandangan ini, informasi akan sangat berguna apabila dapat membantu para pengelola program dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu, kegiatan evaluasi harus direncanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program. Pengumpulan data dan laporan dibuat untuk menambah efektifitas pengelola program.

Selanjutnya karena program sering berubah selama beroperasi dari awal sampai akhir, kebutuhan pemegang keputusan juga tingkat perencanaan, pembuatan program memerlukan informasi tentang masalah dan kapasitas organisasi. Selama dalam tingkat implementasi administrator memerlukan informasi tentang proses yang sedang berjalan.

Bila program sudah selesai, keputusan-keputusan penting akan dibuat berdasarkan hasil yang dicapai. Sebagai akibatnya evaluator harus mengetahui dan mengerti perkembangan program dan harus siap menyediakan bermacam-macam informasi pada bermacam-macam waktu. Idealnya program dan sistem evaluasi dikembangkan bersama, tapi hal ini tidak selalu dapat terjadi. Malahan sering evaluator diminta mengevaluasi setelah program berjalan.

2.3.4.4 Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai (*The User Oriented Approach*)

Sejak tahun 1970-an, evaluasi merupakan sesuatu. komponen standar dari hampir semua program yang dibiayai masyarakat. Para evaluator menjadi sibuk tapi banyak yang merasa kurang puas atas hasil usahanya. Ketidakpuasan ini diakibatkan dari hasil laporan mereka yang sedikit sekali berpengaruh terhadap program yang mereka evaluasi. Walaupun evaluasi telah mengukur sampai sejauh mana tujuan program telah dicapai, tapi hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan.

Sebagai jawaban atas hal tersebut, para peneliti mulai meneliti masalah utilitas evaluasi. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti empiris yang membatasi pemakaian informasi. Sejumlah faktor-faktor positif berhasil dirumuskan,

termasuk keterlibatan langsung para pemegang kunci keputusan, ketepatan waktu informasi, dan kepekaan terhadap konteks organisasi. Lebih-lebih lagi keterlibatan personal tampaknya memegang peran penting dalam mempromosikan pemakaian evaluasi.

Karena banyak faktor-faktor positif dapat dipengaruhi perilaku evaluator, sejumlah peneliti mengembangkan pendekatan baru yang menekankan perluasan pemakaian informasi. Hal ini disebut peningkatan *The User Oriented* seperti apa yang dibayangkan, pemakai informasi yang potensial adalah yang menjadi tujuan utama.

2.3.4.5 Pendekatan yang responsive (*The Responsive Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling lain dari, kelima pendekatan dalam tulisan ini, karena perspektif dalam usulan evaluasi dan metode pencapaian. Evaluasi responsive percaya bahwa evaluasi yang berarti yaitu yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang dari semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dengan program. Evaluator tidak percaya ada suatu jawaban untuk suatu evaluasi program yang dapat ditemukan dengan memakai tes, kuesioner atau analisis statistik. Tapi setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya. Secara unik dan evaluator mencoba menolong menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan pernyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluator adalah berusaha mengerti urusan program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda.

Evaluator juga mengadopsi pendekatan yang bermacam-macam dalam evaluasinya dan dalam mencari tahu dinamika organisasi. Evaluasi responsif ditandai dengan ciri-ciri evaluasi yang kualitatif, naturalistic, bukan kuantitatif. Bukan mengumpulkan data dengan instrumen tes atau kuisisioner tapi melakukan observasi yang langsung atau tidak langsung terhadap kejadian dan interpretasi data yang impresionistik.

2.3.4.6 Goal Free Evaluation

Alasan mengemukakan evaluasi Goal Free Evaluation (evaluasi bebas tujuan), dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: Tujuan pendidikan tak dapat dikatakan sebagai pemberian, seperti tujuan biasanya atau umumnya hanya formalitas dan jarang menunjukkan tujuan yang sebenarnya dari proyek atau tujuan berubail. Lagipula banyak hasil program penting tidak sesuai dengan tujuan program misalnya membangun pusat vocational pendidikan baru akan menciptakan lapangan kerja baru, hasil yang diinginkan tetapi tidak pernah menghasilkan tujuan proyek yang nyata. Scriven percaya bahwa fungsi evaluasi bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan menambah objectifitas.

Dari berbagai metode di atas dapat diketahui bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Berkenan dengan evaluasi yang akan dilakukan, serta berdasarkan uraian berbagai teori evaluasi tersebut, maka metode evaluasi yang sesuai dengan kajian evaluasi program KKK yang akan dilakukan adalah metode CIPP dari Stufflebeam dan Shinkfield. Adapun berbagai pertimbangan yang menjadi dasar penentuan metode tersebut adalah: (1) Metode ini memiliki langkah-langkah yang jelas dan runtun dalam pengungkapan setiap urutan program. (2) Metode CIPP dapat menganalisa secara detail mulai dari proses perencanaan, aplikasi, implementasi dan kelanjutannya. (3) Model CIPP ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator dibandingkan dengan model-model lainnya. Model CIPP ini yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| <i>Context evaluation</i> | : evaluasi terhadap konteks |
| <i>Input evaluation</i> | : evaluasi terhadap masukan |
| <i>Process evaluation</i> | : evaluasi terhadap proses |
| <i>Product evaluation</i> | : evaluasi terhadap hasil |

Keempat kata tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Oleh sebab itu model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

Dalam pelaksanaan evaluasi menurut Stufflebearn selalu menghadapi empat macam keputusan dalam pendidikan dan membaginya kedalam empat macam, yaitu:

1. *Context evaluation to serve planning decision*. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merurnuskan tujuan program.
2. *Input evaluation, structuring decision*. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
3. *Process evaluation, to serve implementing decision*. Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor dikontrol, dan diperbaiki.
4. *Product evaluation, to serve recycling decision*. Evaluasi produk untuk - menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan mengevaluasi program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Komponen-komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2. Evaluasi Masukan

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi masukan. Maksud dari evaluasi masukan adalah kemampuan awal siswa dan sekolah dalam menunjang program, antara lain kemampuan sekolah dalam menyediakan petugas yang tepat dan sebagainya. Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan

mengarah pada "pemecahan masalah" yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada "apa" (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

4. Evaluasi Produk atau Hasil

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program.

Berdasarkan uraian tentang evaluasi model CIPP tersebut maka dalam upaya melakukan evaluasi terhadap Program Kelas Layanan Khusus, model CIPP tepat digunakan sebagai alat evaluasi program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya.

2.4 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi terhadap keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan model pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus sesuai dengan model evaluasi CIPP dan juga model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle harus bisa mengungkapkan bagaimana kebijakan itu dibuat, aktornya siapa saja, karakteristik lembaga yang berperan dalam kebijakan tersebut, sumber daya yang digunakan, kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana kebijakan. Sebagai outputnya hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari model kebijakannya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, data yang akan dihimpun akan dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan-pandangan dari subjek penelitian sehingga bisa diungkapkan faktor-faktor keunggulan apa yang membuat Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa melaksanakan model program pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus sementara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lain tidak bisa melaksanakan, bagaimana implementasinya, mengetahui keunggulan dan kelemahan pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya, serta mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya secara menyeluruh baik dari segi konteks, input, proses dan produk.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan model analisis evaluasi dengan pendekatan metode kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan akan dicoba untuk diolah dan disajikan dalam deskripsi berdasarkan ungkapan, bahasa cara berpikir dan pandangan-pandangan subjek penelitian sehingga diharapkan akan dapat diketahui sejauhmana faktor-faktor yang ada di lingkungan Kota Surabaya baik pada Dinas Pendidikannya, aparat dibawahnya dan pengaruh dukungan dari masyarakat yang membuat program Kelas Layanan Khusus bisa berjalan di wilayah Kota Surabaya.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer yang digunakan akan diambil oleh penulis secara langsung pada obyek penelitian (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sampel sekolah penyelenggara, masyarakat) atau data yang diambil dari

penelitian sebelumnya. Data akan berbentuk transkrip wawancara dengan para responden terkait, catatan-catatan yang mendukung penelitian ini dan lain sebagainya

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan akan diambil dari cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Data ini bisa diambil dari buku-buku tentang anak putus sekolah, pelaksanaan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus pada Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan untuk semua (*Education for All*) dan sebagainya. Dengan menggunakan studi kepustakaan ini diharapkan penelitian ini menjadi lebih terarah dan lebih sistematis.

3.4 Tempat dan Waktu Evaluasi

Tempat pelaksanaan evaluasi implementasi program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus ini adalah di Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur. Sedangkan objek penelitian adalah 2 (dua) sekolah dasar yang menyelenggarakan program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya yang menggunakan dana APBD Kota Surabaya. Waktu evaluasi implementasi program ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan beragam fakta yang berhubungan dengan masalah evaluasi program. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam evaluasi ini digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, teknik angket dan wawancara.

(1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi

penelitian maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi mencakup keadaan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus yang ada pada 2 sekolah penyelenggara program kelas layanan khusus di Kota Surabaya.. Selain itu, dikumpulkan pula bahan-bahan tertulis yang berupa data akademik, pembiayaan, serta laporan-laporan pelaksanaan kegiatan Kelas Layanan Khusus dari setiap lokasi penelitian. Data tersebut merupakan bahan deskripsi maupun bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

(2) Wawancara

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara yang bersifat "unstructured", yaitu wawancara yang terfokus pada suatu masalah tertentu (*focused interview*) dan wawancara bebas (*free interview*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berpindah-pindah dari satu pokok ke pokok lain, sepanjang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menjelaskan aspek-aspeknya. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi pelengkap atas data yang telah dikumpulkan melalui angket dan studi dokumentasi. Subjek yang diwawancara terdiri dari atas beberapa subjek anggota sampel penelitian atau pihak lain yang dianggap dapat melengkapi keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan maka dapat disajikan kisi instrumen sebagai panduan awal untuk menyusun instrumen baik pedoman studi dokumentasi, pedoman wawancara dan butir-butir pertanyaan angket. Kisi-kisi tersebut disajikan pada tabel kisi pedoman wawancara, pada halaman berikut.

(3) Studi Literatur/kepuustakaan

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penulis akan melakukan studi kepuustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data yang sudah terdokumentasikan. Studi ini dilakukan terhadap keputusan/peraturan/kebijakan maupun prosedur mengenai Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya maupun studi terhadap hasil penelitian-

penelitian sebelumnya yang terkait dengan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus maupun obyek penelitian.

3.6 Teknik Dan Analisa Data

Data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara :

1. Proses Reduksi Data, yaitu proses mengkategorikan data dan mengelompokkannya ke dalam tingkatan valuasi data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari wawancara, studi pustaka maupun dokumen akan diklasifikasikan ke dalam tingkat kepentingannya, dirangkum dan dipilah-pilah ke dalam hal yang substansial. Masing-masing data akan di *cross check* ke data yang lain sehingga akan didapat keakuratan data.
2. Penyajian Data, yaitu data yang sudah direduksi, dipilah dan dikelompokkan seperti tersebut diatas akan di sajikan dalam bentuk gambar maupun tabel sehingga mudah dipahami.
3. Kesimpulan dan verifikasi, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yang sudah diolah dan disajikan dalam tahapan sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan di mulai dari hal-hal yang khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum.

BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KELAS LAYANAN KHUSUS

4.1 Profil Kota Surabaya

Letak lokasi penelitian berada dalam wilayah Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, letaknya di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m diatas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Di Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas. Luas wilayah Kota Surabaya 374,36 km², terbagi dalam 5 (lima) wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Barat. Kota Surabaya berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
- Sebelah Utara dan Timur : Selat Madura

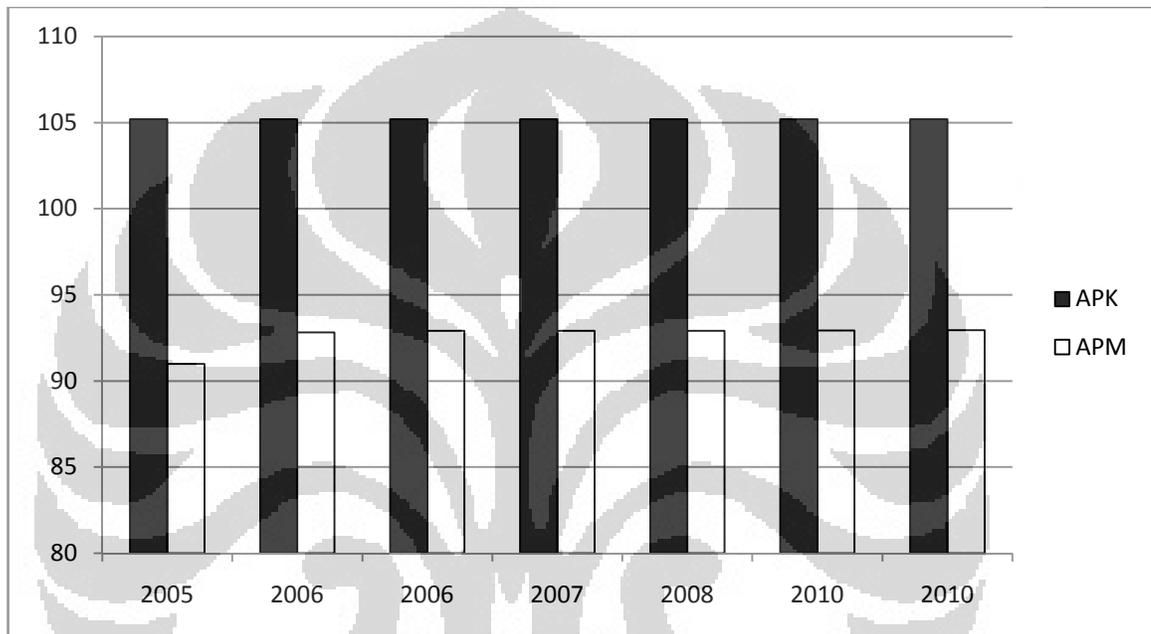
Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.765.908 jiwa. Dengan wilayah seluas 333,063 km², maka kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 8.304 jiwa per km². 755.914 kepala keluarga dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1.437.682 (50,23%) dan penduduk perempuan berjumlah 1.424.246 (49,77%) yang tersebar di 31 Kecamatan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang jasa, industri dan perdagangan. Berdasarkan profesinya penduduk Kota Surabaya terbanyak adalah sebagai pegawai swasta berjumlah 684.581 jiwa, ibu rumah tangga 527.343 jiwa dan pelajar berjumlah 448.551 jiwa. Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan golongan umur terdiri dari 209.506 orang (usia 5-9 tahun), 195.483 orang (usia 10-14

tahun), 181.725 orang (usia 15-19 tahun). Suku Jawa adalah suku bangsa mayoritas di Surabaya. Dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, Suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih *keras* dan *egaliter*. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari kraton yang dipandang sebagai *pusat* budaya Jawa. Meskipun Jawa adalah suku mayoritas (83,68%), tetapi Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk suku Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%), dan sisanya merupakan suku bangsa lain atau warga asing.

Generasi muda yang berkualitas, handal dan berbudaya adalah merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi pada tahun 2020. Pendidikan merupakan pondasi untuk mencetak generasi muda yang diharapkan, kuncinya terletak pada pemberian layanan pendidikan terhadap anak khususnya anak-anak usia sekolah dasar yang jumlahnya mencapai 25% dari jumlah penduduk. Pada kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut terhadang oleh beberapa kendala diantaranya:

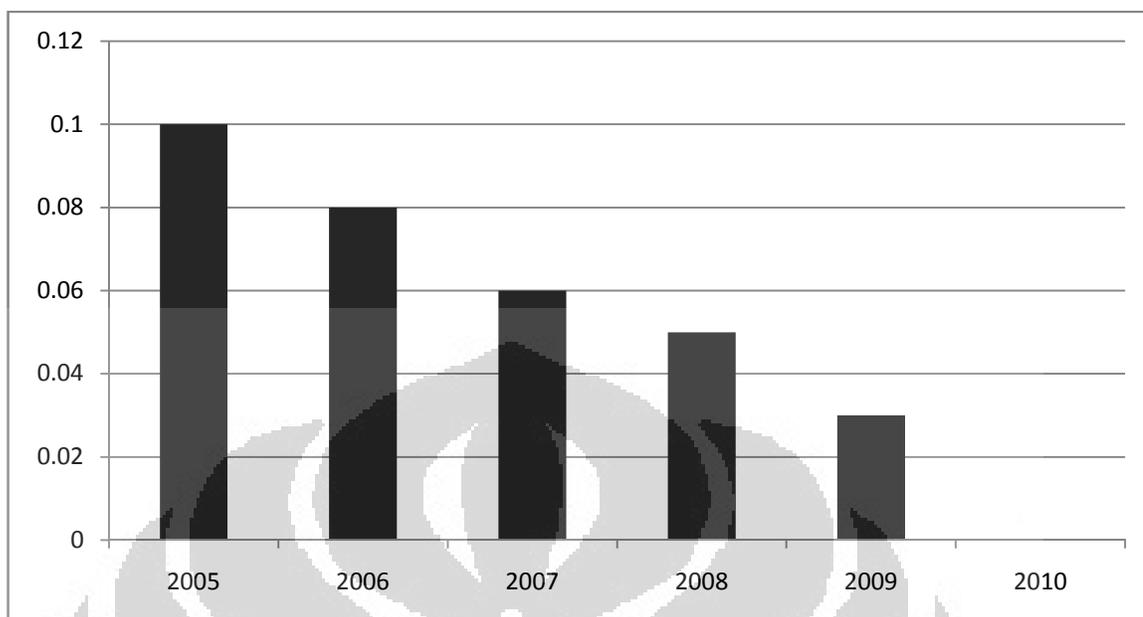
- (1) Terancamnya anak putus sekolah dikarenakan kondisi keluarga yang miskin, data kemiskinan di Kota Surabaya berjumlah 323.789 jiwa atau 90.084 keluarga miskin dan jumlah anak miskin pada usia sekolah sebesar 68.834 orang (usia 7-18 tahun), dengan kondisi pendidikan 31.795 anak duduk di sekolah dasar, 2.082 anak tidak sekolah (usia 7-12 tahun), 4.182 anak duduk di sekolah dasar, 11.926 anak sekolah di sekolah menengah tingkat pertama dan 26 anak tidak sekolah (usia 12-15 tahun).
- (2) Kultur masyarakat yang masih terbentuk berpendapat bahwa menuntut ilmu agama lebih penting dari pada ilmu yang diajarkan di sekolah formal,
- (3) Terbatasnya sarana sekolah yang menyediakan kelas layanan khusus bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah dasar sehingga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta berguna bagi lingkungannya.

Hasil capaian kinerja pembangunan pendidikan tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah Kota Surabaya terkait langsung dengan perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APS) seperti disajikan pada tabel sebagai berikut.



Gambar 4.1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI tahun 2005 s.d 2010

Selain itu keberhasilan dalam menekan Angka Putus Sekolah (APS) seperti ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 4.2. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI tahun 2005 s.d 2010

Berdasarkan target capaian angka putus sekolah tahun 2010 sebesar 0%, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berusaha menekan angka putus sekolah tersebut dengan berbagai program salah satunya melalui program Kelas Layanan Khusus (KLK). Program ini secara nasional telah dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2003. Keberhasilan program ini telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

4.2 Profil Sekolah

4.2.1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banyu Urip III/364

SDN Banyu Urip III/364 merupakan sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan kelas reguler dan sekolah layanan khusus. Berlokasi di Jalan Banyu Urip Kidul, Gang IV No. 17, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sagatan,

Kota Surabaya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1979 dan sekarang sudah mendapatkan akreditasi B. Sekolah Dasar ini memiliki visi terciptanya sekolah yang mandiri, berkualitas, berwawasan nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan misi sekolah ini adalah :

- (1) mencetak siswa yang terampil, cerdas, kreatif dan mandiri
- (2) mewujudkan siswa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta berbudi pekerti luhur
- (3) meningkatkan kinerja guru,
- (4) menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, aman, sehat dan indah
- (5) menumbuhkembangkan nilai-nilai seni dan budaya dan
- (6) menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah, Komite dan masyarakat.

Sekolah ini juga mencanangkan tujuan pendidikan di lingkungan sekolahnya

- (1) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (2) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia,
- (3) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang sehat secara fisik dan psikologis sehingga dapat berkembang dengan mudah untuk menjadi manusia kreatif
- (4) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang mampu berpikir logis, bersikap kritis, berani mengambil keputusan yang efektif.
- (5) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang mau belajar, berkarya, berkeaktifan, dan selalu mengembangkan potensi diri
- (6) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang ikhlas berbagi empati dan toleransi serta mampu bekerja sama dengan orang lain,

- (7) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang mencintai bangsa, negara dan budayanya, dan
- (8) agar siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang berkemampuan dalam pengetahuan dan keterrampilan sebagai bekal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Ruang kelas di sekolah ini terdiri dari 5 ruang kelas dengan 10 rombongan belajar, sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pagi – siang, 1 ruangan Kepala Sekolah, 1 ruangan Guru, 1 ruangan perpustakaan dan 1 ruangan laboratorium komputer.

Jumlah siswa sekarang ini ada 510 siswa dengan 12 rombongan belajar. Jumlah siswa tersebut tadi di luar jumlah siswa Kelas Layanan Khusus yang berjumlah 22 siswa.

Di SDN Banyu Urip kelas layanan khusus (KLK) baru diadakan pada tahun ajaran 2009/2010. Sekolah ini menyelenggarakan program kelas layanan khusus dengan tujuan untuk

- (1) menangani anak-anak yang putus sekolah agar bisa mengenyam pendidikan sekolah kembali
- (2) setelah mengikuti kegiatan pendidikan kelas layanan khusus kurang lebih enam bulan siswa kelas layanan khusus dapat dipindahkan ke dalam kelas regular
- (3) dengan mengikuti sistem belajar mengajar disekolah dengan kelas layanan khusus diharapkan siswa tersebut dapat menyerap pendidikan untuk pengembangan karakternya.

4.2.2 Sekolah Dasar Negeri Dupak I

SDN Negeri Dupak I merupakan sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan kelas reguler dan sekolah layanan khusus. Berlokasi di Jalan Alun-alun Bangunsari Barat No. 2, Kota Surabaya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1975 dan sekarang sudah mendapatkan akreditasi B. Sekolah Dasar ini memiliki visi

yaitu menciptakan siswa cerdas, trampil, peduli, dan berakhlak mulia, serta berani bersaing dalam dunia pendidikan. Sedangkan misi sekolah ini adalah :

- (1) meningkatkan mutu pendidikan,
- (2) meningkatkan kinerja sekolah beserta jajarannya,
- (3) memberi kepercayaan pada publik, dan
- (4) transparansi manajemen dan akuntabilitas.

Sekolah ini juga mencanangkan tujuan pendidikan di lingkungan sekolahnya yaitu:

- (1) hasil pendidikan (output) dapat dirasakan publik/masyarakat,
- (2) mendapat dukungan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan,
dan
- (3) mendapat kepercayaan publik.

Ruang kelas di sekolah ini terdiri dari 15 ruang kelas dengan 28 rombongan belajar, sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pagi – siang, Ruang penunjang yang dimiliki terdiri dari: 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruangan laboratorium komputer, 1 ruang mushola, 2 ruang KM/WC guru, dan 2 ruang KM/WC siswa.

Jumlah siswa sekarang ini ada 955 siswa dengan 28 rombongan belajar. Jumlah siswa tersebut tadi diluar jumlah siswa Kelas Layanan Khusus yang berjumlah 24 siswa. Di SDN Dupak I program Kelas Layanan Khusus (KLK) baru diadakan pada tahun ajaran 2009/2010. Sekolah ini menyelenggarakan program kelas layanan khusus dengan tujuan untuk

- (1) menangani anak-anak yang putus sekolah agar bisa menyenangi pendidikan sekolah kembali

(2) setelah mengikuti kegiatan pendidikan kelas layanan khusus kurang lebih enam bulan siswa kelas layanan khusus dapat dipindahkan ke dalam kelas reguler

(3) dengan mengikuti sistem belajar mengajar disekolah dengan kelas layanan khusus diharapkan siswa tersebut dapat menyerap pendidikan untuk pengembangan karakternya.

4.3. Program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (SD KLK)

4.3.1. Pendekatan Dasar Program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus.

Salah satu program besar bidang pendidikan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendukung keberhasilan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar sembilan tahun. Berbagai upaya pemerintah telah dilaksanakan, salah satunya adalah Program Kelas Layanan Khusus. Program ini merupakan program pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan kesiapan belajar bagi murid putus sekolah. Masalah kesiapan belajar tersebut sebagai akibat dari masalah dropout sekolah yang dialaminya seperti akibat putus sekolah atau karena belum pernah mengikuti pendidikan formal. Kesiapan tersebut menjadi kemampuan secara akademis, psikologis, dan sosial untuk mampu mengikuti pembelajaran bersama di kelas reguler.

Program Kelas Layanan (KLK) pada dasarnya merupakan suatu program pembelajaran yang dilaksanakan di kelas khusus. Sampai saat ini pendidikan khusus yang dikembangkan adalah pendidikan bagi anak yang memiliki masalah fisik dan psikologis. Perkembangan permasalahan pendidikan yang semakin kompleks, menimbulkan berbagai per-kembangan istilah anak berkelainan dalam belajar. Hal tersebut bukan saja diakibatkan keadaan fisik namun juga psikis dan sosial. Salah satu masalah yang muncul saat ini adalah anak berkelainan akibat sosial yang berkaitan dengan bidang ekonomi keluarga, yang selanjutnya disebut murid KLK. Murid KLK pada umumnya berkaitan dengan dengan tinggal kelas dan putus sekolah karena

kemampuan ekonomi keluarga atau lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap murid-murid KLK tersebut.

Program KLK ini oleh Pemerintah Pusat telah dirintis sejak tahun 2003 melalui suatu program uji coba di 15 Kota, yaitu: Medan, Palembang, Serang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, dan Makasar. Program yang telah diujicobakan tersebut dinilai efektif dan akan dikembangkan ke seluruh propinsi di Indonesia dalam rangka menjaring jutaan anak-anak yang belum bersekolah atau putus sekolah untuk dapat bersekolah sampai tamat Sekolah Dasar.

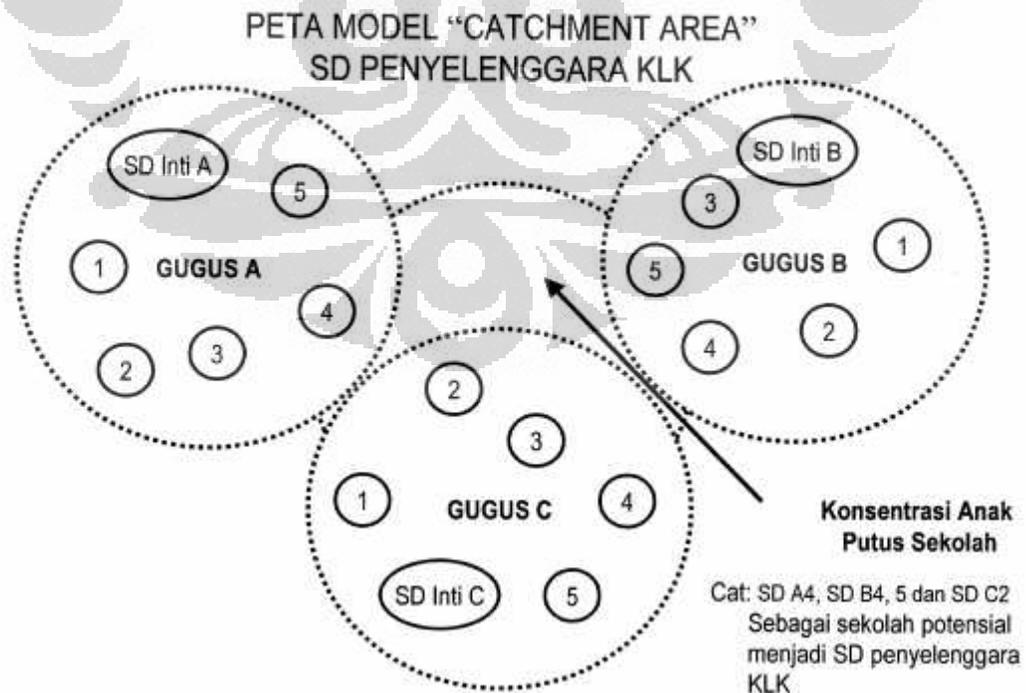
4.3.2. Tujuan dan Sasaran Program Kelas Layanan Khusus.

Tujuan umum program kelas layanan khusus (KLK) di Sekolah Dasar adalah agar anak-anak usia Sekolah Dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah memperoleh pendidikan di Sekolah Dasar sampai tamat. Sedangkan tujuan khusus penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KLK) di Sekolah Dasar adalah membantu peserta didik menyiapkan diri secara psikologis, sosiologis dan akademis untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler.

Perkembangan permasalahan pendidikan yang semakin kompleks, menimbulkan berbagai perkembangan istilah anak berkelainan dalam belajar. Hal tersebut bukan saja diakibatkan keadaan fisik namun juga psikis dan sosial. Salah satu masalah yang muncul adalah anak berkelainan sebagai akibat sosial berkaitan dengan bidang ekonomis. Anak berkelainan tersebut pada umumnya berkaitan dengan tinggal kelas dan putus sekolah karena ketiadaan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak-anak berkelainan, baik yang telah bersekolah di sekolah umum tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan

dan kebutuhannya, maupun terhadap anak-anak berkelainan yang belum sampai mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di sekolah umum.

Model pendidikan anak berkelainan tertua adalah model segregatif yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregatif memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun demikian, dari sudut pandang peserta didik, model segregatif merugikan. Hal ini dinyatakan oleh Reynolds dan Birch dalam Sunardi, bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofis model segregatif tidak logis, karena menyiapkan peserta didik agar kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. (Sunardi, Menuju Pendidikan Inklusif, Bandung, hal. 3). Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal.



Gambar 4.3. Peta Model Catchment Area

4. Guru

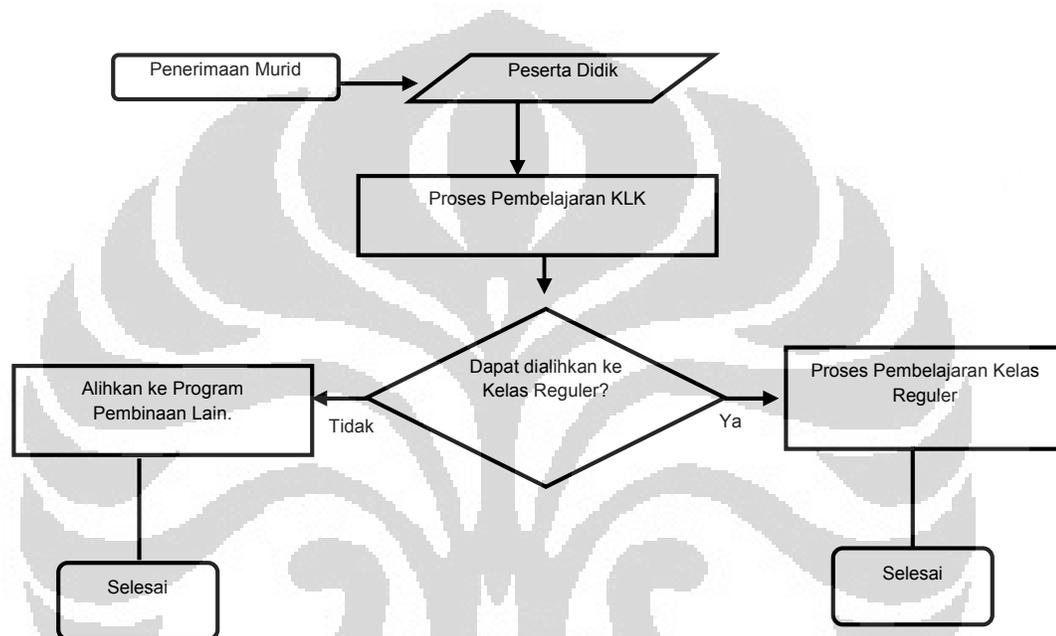
Kriteria guru SD KLK adalah:

- Berasal dari SD penyelenggara Kelas Layanan Khusus
- Diutamakan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Berpengalaman mengajar di Sekolah Dasar minimal 5 (lima) tahun
- Lulus seleksi

5. Desain Program

- Diselenggarakan dengan membuka kelas khusus pada Sekolah Dasar Negeri yang berada di suatu lokasi yang banyak terdapat anak-anak belum bersekolah atau putus sekolah.
- Merupakan kelas sementara bukan kelas permanen dan pembelajarannya dilaksanakan di luar jadwal kelas reguler.
- Setiap Sekolah Penyelenggara KLK dikelola oleh seorang kepala sekolah dan 3 (tiga) orang guru yang berasal dari sekolah tersebut.
- Setiap peserta didik diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan s/d 1 (satu) tahun duduk di KLK sampai ia memiliki kemampuan psikologis, sosiologis, dan akademis yang memadai untuk dialihkan ke kelas reguler.
- Peserta didik yang telah memiliki kemampuan psikologis dan sosiologis yang memadai sehingga dinilai telah mampu beradaptasi dengan siswa reguler, akan dialihkan ke kelas reguler sesuai dengan tingkat kematangan kepribadiannya masing-masing, atau berdasarkan hasil tes penempatan (*placement test*.)
- Jika dalam waktu 1 (satu) tahun ajaran peserta didik tidak bisa pindah ke kelas reguler (mengalami kesulitan) maka akan dikeluarkan dari KLK dan akan dipindahkan ke program lain.

- Mendapat bantuan dana penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus dalam bentuk *Block Grant* ke sekolah penyelenggara KLK mencakup: (1) Biaya Operasional; (2) Honor Pengelola; (3) Beasiswa; dan (4) Buku Perpustakaan.
- Peserta didik yang telah dialihkan ke kelas reguler dibiayai melalui beasiswa atau biaya lain dari daerah sampai tamat Sekolah Dasar.



Gambar 4.4. Diagram Skenario Peserta didik SD KLK

6. Desain Pembelajaran

- Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah Pembelajaran Terpadu dan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) atau *Multigrade Teaching*.
- Peserta didik dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu kelas rangkap A (KRA) terdiri dari peserta didik dengan tingkat kelas 1 dan 2, kelas rangkap B (KRB) terdiri dari peserta didik dengan tingkat kelas 3 dan 4, dan kelas rangkap C (KRC) terdiri dari peserta didik dengan tingkat kelas 5 dan 6.
- Kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum yang berlaku di kelas reguler.

- Intervensi psikologis dan sosiologis yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran sangat ditekankan dalam pembelajaran di Kelas Layanan Khusus (KLK) guna mempersiapkan peserta didik mengikuti pembelajaran di kelas reguler.

7. Mekanisme Program

- Dinas Pendidikan menentukan Sekolah Dasar penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLK) dan mensosialisasikan program kepada Kepala Sekolah, Guru, dan masyarakat.
- Dinas Pendidikan menetapkan sekolah dan pengelola serta menyelenggarakan diklat bagi kepala sekolah dan guru penyelenggara Kelas Layana Khusus.
- Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah dalam kerangka pembinaan kepada sekolah-sekolah penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLK).

4.3.3 Pendekatan Pembelajaran

Menurut Gagne, Bring, dan Wagner (*Principles of Instructional Design*, 1988, p. 114) pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang agar terjadi proses belajar ada diri siswa. Dari pengertian tersebut, rangkaian kegiatan yang dipersiapkan tidak selalu dilaksanakan di dalam kelas, tetapi seluruh kegiatan baik di dalam dan di luar kelas seperti perpustakaan, musium, dan bahkan di rumah yang kesemuanya memang didesain untuk siswa agar melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, yang menjadi ciri utama dari pembelajaran adalah unsur kesengajaan dari pihak di luar siswa yang mempersiapkan situasi dan suasana sedemikian rupa agar tercipta kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah ketercapaian dari kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah melewati suatu proses belajar.

Pendekatan pembelajaran kelas layanan khusus, pada dasarnya guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar seperti berikut: (Udin, S. Winataputra, dan Siti Juleeha: 2003: p. 18).

a. **Kesiapan.** Yang dimaksud kesiapan adalah mencakup kesiapan fisik, intelegensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang lalu, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan siswa dapat belajar. Apabila siswa belum siap untuk melaksanakan tugas belajar, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan untuk menguasai kemampuan yang diharapkan. Beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan seorang siswa dalam belajar yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran:

- 1) siswa dapat belajar dengan baik apabila tugas-tugas yang diberikan berhubungan dengan kemampuan, minat dan latar belakang mereka,
- 2) guru yang baik harus mengkaji dahulu dengan melakukan pengetesan kesiapan untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan siswa,
- 3) guru harus menyiapkan tugas yang sesuai dengan kesiapan siswa,
- 4) guru harus menyadari bahwa siswa-siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang sama dapat saja memiliki pola kemampuan mental yang berbeda, sehingga guru dapat merancang kegiatan yang sesuai,
- 5) bahan-bahan dan kegiatan harus dirancang secara bervariasi sesuai dengan faktor kesiapan siswa.

b. **Motivasi.** Secara alami, anak-anak selalu memiliki rasa ingin tahu dengan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya dan mencoba-coba hal yang baru atau unik, sehingga guru harus dapat mendorong atau memotivasi para siswa dan bukan menghambat. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan proses pembelajaran yaitu:

- 1) hendaknya siswa didorong untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang lebih dari yang didapat atau dipunyai saat ini,

- 2) siswa harus diyakinkan bahwa pengalaman tentang kegagalan yang tidak merusak citra diri siswa dapat menjadi motivasi agar siswa memelihara kesungguhan dalam belajar,
- 3) rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan akan cenderung meningkatkan motivasi belajar,
- 4) proses belajar yang dikaitkan dengan minat siswa akan dapat mempertinggi motivasi.
- 5) komentar dan penguatan yang diberikan guru atau teman sebaya akan berpengaruh terhadap motivasi dan perilaku,
- 6) perlu dicermati oleh guru agar insentif atau hadiah yang diberikan memang tepat untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar,
- 7) kompetisi yang terlalu ketat dengan kriteria yang terlalu tinggi yang akan membuat kesempatan menang relatif kecil, dapat mengurangi motivasi para siswa.

c. **Persepsi.** Seorang guru akan dapat memahami siswasiswanya lebih baik, bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Siswa yang memiliki persepsi positif terhadap kegiatan belajar dan dirinya, akan membuat siswa senang dan bersungguhsungguh dalam belajar.

Hal-hal yang harus diperhatikan guru berkenaan dengan menumbuhkan persepsi positif para siswa adalah:

- 1) guru hendaknya memberikan tugas yang memang dapat diselesaikan para siswa sesuai dengan kecepatan masing-masing,
- 2) guru mempersiapkan kegiatan kelompok yang didasarkan atas pengelompokkan siswa berdasarkan kesanggupan siswa yang sama.

- 3) guru menyiapkan tugas tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran dan memberikan tugas pengayaan bagi siswa yang pandai,
- 4) melaksanakan pembelajaran proyek atau unit, yang mengarahkan siswa agar dapat memecahkan permasalahan yang ditinjau dari berbagai bidang pengetahuan,

d. **Transfer dan Retensi.** Belajar dapat dikatakan bermakna apabila siswa dapat menyerap dan menyimpan (retensi) serta menggunakan (transfer) ilmu yang dipelajarinya dalam situasi yang lain.

Beberapa hal berikut ini harus diperhatikan guru agar proses transfer dan retensi berhasil:

- 1) bahan yang bermakna yang disiapkan guru akan lebih mudah diserap dan disimpan dalam benak siswa,
- 2) kegiatan latihan yang terbagi-bagi memungkinkan terjadi retensi yang baik,
- 3) mengakhiri proses pembelajaran dengan melakukan penyimpulan atau perangkuman dari materi yang diajarkan, dapat memperkuat retensi dan transfer.

e. **Belajar kognitif.** Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Proses belajar kognitif dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru antara lain sebagai berikut:

- 1) pengalaman belajar harus diorganisasikan ke dalam satuan-satuan pembelajaran yang sesuai,

- 2) dalam memecahkan masalah, para siswa harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah serta memungkinkan siswa berpikir menyebar.

f. **Belajar Afektif.** Cakupan belajar afektif adalah nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam beberapa situasi pembelajaran, kadang-kadang siswa tidak menyadari belajar afektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru:

- 1) sikap dan nilai sering terbentuk melalui proses identifikasi dari orang lain dan bukan sebagai hasil belajar langsung.
- 2) sikap lebih mudah dibentuk melalui pengalaman yang menyenangkan,
- 3) nilai-nilai yang ada pada diri siswa juga dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok,
- 4) belajar afektif dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi dengan guru dalam kelas,
- 5) siswa dapat dibantu mengenal dan memahami sikap, peranan, dan emosi. Penghargaan terhadap sikap, perasaan, dan frustrasi sangat perlu untuk membantu siswa memperoleh pengertian diri dan kematangannya.

g. **Belajar Psikomotor.** Proses belajar psikomotor menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar jenis ini menuntut keaktifan aspek mental dan fisik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar psikomotor adalah:

- 1) guru harus dapat menciptakan kondisi bermain dan aktivitas informal, agar siswa dapat memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya dengan lebih baik,

- 2) faktor lingkungan dapat memberi pengaruh terhadap bentuk dan cakupan penampilan psikomotor siswa,
- 3) tugas-tugas psikomotor yang terlalu sukar dan berat bagi siswa dapat menimbulkan frustrasi (keputusasaan) dan kelelahan yang lebih cepat.

Dalam kaitannya dengan tugas guru yang mengelola kelas layanan khusus, dimana para siswa yang ada di dalamnya memiliki kekhasan sendiri, maka guru seyogyanya menggunakan prinsip belajar di atas agar proses belajar para siswa dapat bermanfaat.

4.3.4. Berbagai Pendekatan dalam Pembelajaran.

Dengan memperhatikan karakteristik yang khas dari para siswa di kelas layanan khusus dan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar yang ada, maka ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran yang dapat diaplikasikan untuk kelas layanan khusus, seperti pembelajaran terpadu, kelas rangkap, dan kooperatif yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran terpadu model terjala. Dalam pembelajaran terpadu model terjala, proses pembelajaran dimulai dari suatu tema. Oleh karena itu, model pembelajaran ini dikenal juga dengan sebutan Pembelajaran Tematik.

Dengan menerapkan model pembelajaran tematik, baik guru maupun siswa akan memperoleh banyak manfaat. Adapun manfaat pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu:

- 1) pembelajaran tematik memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dalam belajar. Pengintegrasian materi dalam sebuah tema

akan memudahkan guru dalam membahas materi pada kelas dengan tingkatan kemampuan yang berbeda.

- 2) siswa memiliki kesempatan untuk belajar dan menggunakan keterampilan ke dalam situasi yang nyata.
- 3) siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi, terutama apabila tema yang dibahas ditentukan secara bersama-sama dengan siswa.
- 4) dengan menerapkan pembelajaran tematik, siswa tidak hanya memperoleh dampak pembelajaran (instructional effects) tetapi juga dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran yang berlangsung sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa.

b. Pembelajaran Kelas Rangkap

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Multigrade Teaching (MGT). MGT mengandung dua pengertian yaitu Multiclass Teaching dan Multilevel Teaching. Multiclass Teaching yakni proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam waktu bersamaan dengan menggunakan perangkapan kelas (dua kelas atau lebih). Sedangkan Multilevel Teaching adalah proses pembelajaran terhadap beberapa kelompok peserta didik yang berbeda tingkat kemampuannya dan dilakukan oleh seorang guru dalam waktu yang bersamaan. Multiclass Teaching menekankan pada perbedaan tingkat kelas, sedangkan Multilevel Teaching menekankan pada perbedaan tingkat kemampuan peserta didik. Berikut ini diberikan beberapa alasan penerapan PKR dalam kelas yaitu: (A. Djalil ; 2003 ; 45)

- Kuantiti dan ekuiti. PKR dapat membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran untuk jumlah peserta didik yang lebih besar (kuantiti), merata, dan adil (ekuiti) dengan memanfaatkan guru dan ruang kelas yang terbatas.

- Ekonomis. PKR memungkinkan satuan biaya pendidikan jauh lebih kecil. Dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan sampai ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil.
- Pedagogis. PKR mampu meningkatkan kemandirian dan keaktifan peserta didik dalam belajar. Peserta didik yang dianggap lebih pintar dapat membantu peserta didik lainnya (sebagai tutor sebaya). Dalam PKR, peserta didik terkondisi bekerja secara individual, berpasangan, atau bekerja dalam kelompok.
- Keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak-anak mereka menjadi berkurang.
- Suatu pembelajaran dianggap menerapkan pendekatan PKR apabila pembelajaran tersebut menunjukkan penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut.
- Keserempakan. Pembelajaran dilakukan secara serempak dan dalam kurun waktu yang bersamaan pada dua kelas atau lebih (multiclass teaching) dan atau pada beberapa kelompok siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda (multilevel teaching). Keserempakan ini bermutu dan bermakna, artinya kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- Waktu Aktivitas Akademik Tinggi. Dalam PKR, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru tidak meninggalkan peserta didik atau kelompok belajar dalam keadaan menganggur atau tidak ada kegiatan.
- Kontak Psikologis yang Berkelanjutan. Kontak dengan peserta didik dilakukan secara terus menerus. Guru selalu melakukan pengawasan dan memberikan balikan serta dorongan kepada peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan berbagai teknik, guru memberikan perhatian kepada setiap peserta didik.

- Pemanfaatan Sumber Belajar secara Efisien. Tingkat penggunaan berbagai sumber belajar, baik buku maupun sumber belajar lainnya sangat tinggi. Hal itu terjadi karena guru tidak selamanya dapat berhubungan secara tatap muka dengan peserta didik secara terus menerus.
- Belajar Mandiri. Prinsip ini merupakan akibat langsung dari penerapan prinsip-prinsip sebelumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut peserta didik akan memiliki kebiasaan untuk belajar secara mandiri. Dalam belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru tapi juga dengan kelompok belajar dan sumber belajar lainnya.

Banyak variasi model PKR yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan PKR. Dalam KLK ini, model yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran adalah model PKR 211 (dua kelas, satu mata pelajaran, dalam satu ruang) atau PKR 221 (dua kelas, dua mata pelajaran, dalam satu ruang). Pemilihan model tergantung pada kondisi setempat. (Udin S Winataputra & Siti Julaha; 66)

c. **Pembelajaran Kooperatif.**

Pendekatan dalam proses pembelajaran ini memandang belajar sebagai suatu arena untuk memupuk kerja sama antar-individu atau antar-kelompok. Dalam kaitannya dengan tujuan utama yang dirancang dalam kelas layanan khusus, pembelajaran kooperatif ini sangat sesuai untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi bagi para siswa yang tidak mendapatkan suasana bermain dan belajar yang semestinya karena lebih banyak dijalan dan bekerja. Penggunaan pembelajaran kooperatif secara benar dapat: (1) mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran; (2) tumbuhnya sikap saling menghormati antar anggota kelompok dan sportifitas di antara para siswa; (3) sifat menghargai perbedaan dan keragaman pendapat dapat dibina; (4) diantara para siswa yang menjadi anggota kelompok dapat saling

memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki; dan (5) terbentuknya kebiasaan bekerjasama dan saling membantu. Karakteristik yang menonjol dari pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berlangsung dalam berbagai jenis kelompok siswa untuk mengeksplorasi berbagai pengetahuan yang dimiliki para siswa dalam mengerjakan suatu tugas. Kelompok-kelompok yang dibentuk dapat berasal dari berbagai jenis kelompok siswa, seperti kelompok siswa yang homogen baik dari segi usia maupun kemampuan, kelompok siswa heterogen dari segi usia dan kemampuan, kelompok siswa acak, dan kelompok siswa berdasarkan jenis kelamin. Walaupun pembelajaran kooperatif berbasiskan pada kerja kelompok, tetapi tidak semua kerja kelompok dapat dikatakan pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari pembelajaran ini, ada 5 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengelola pembelajaran yang sering disebut pembelajaran gotong royong ini.

- 1) Saling ketergantungan secara positif. Artinya seluruh anggota mempunyai peranan dan kontribusi dalam menentukan keberhasilan kelompoknya. Dengan demikian, guru harus dapat menyusun tugas sedemikian rupa dalam kelompok kerja sehingga memungkinkan setiap anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain juga dapat mencapai tujuan mereka. Dalam hal penilaian yang diterapkan guru, ada nilai yang diperoleh untuk masing-masing siswa dan ada pula nilai kelompok yang ditentukan dari nilai masing-masing anggota kelompok,
- 2) Tanggungjawab perseorangan. Hal ini merupakan akibat langsung dari aturan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai kontribusi dalam nilai kelompok yang diperoleh. Dalam pembelajaran ini, guru harus merancang tugas yang mengharuskan masing-masing anggota

kelompok melak-sanakan tanggungjawabnya sendiri agar tugas berikutnya dalam kelompok dapat dikerjakan.

- 3) Tatap muka. Setiap anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi.
- 4) Komunikasi antar anggota. Sebelum guru memberikan tugas kerja kelompok, para siswa harus sudah dibekali dengan kemampuan berkomunikasi. Perlu diingat, tidak semua para siswa mempunyai kemampuan saling mendengarkan dan mengutarakan buah pikiran mereka dengan jelas dan dimengerti.
- 5) Evaluasi proses kelompok. Guru hendaknya merancang waktu khusus agar kelompok dapat mengevaluasi proses kerja kelompok yang telah dilaluinya sehingga untuk kerja kelompok selanjutnya dapat berlangsung dengan efektif.

Sedangkan menurut National Board for Profesional Teaching Skill yang ada di Amerika Serikat, standar kompetensi bagi guru yang menjadi dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru, dengan menggunakan rumusan What Teachers Should Know and Be Able to Do, didalamnya ada 5 (lima) proposisi utama yang dieharusnya dipunyai oleh masing-masing guru, yaitu:

1. Teachers are Committed to Students and Their Learning yang mencakup : (a) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (b) pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, (c) perlakuan guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan (d) misi guru dalam memperluas cakrawala berfikir siswa.
2. Teachers Know the Subjects They Teach and How to Teach Those Subjects to Students mencakup : (a) apresiasi guru tentang pemahaman materi mata pelajaran untuk dikreasikan, disusun dan dihubungkan dengan mata pelajaran lain, (b) kemampuan guru untuk menyampaikan materi pelajaran (c) mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara (multiple path).

3. Teachers are Responsible for Managing and Monitoring Student Learning mencakup: (a) penggunaan berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran, (b) menyusun proses pembelajaran dalam berbagai setting kelompok (group setting), kemampuan untuk memberikan ganjaran (reward) atas keberhasilan siswa, (c) menilai kemajuan siswa secara teratur, dan (d) kesadaran akan tujuan utama pembelajaran.
4. Teachers Think Systematically About Their Practice and Learn from Experience mencakup: (a) Guru secara terus menerus menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik, (b) guru meminta saran dari pihak lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk meningkatkan praktek pembelajaran.
5. Teachers are Members of Learning Communities mencakup : (a) guru memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya, (b) guru bekerja sama dengan tua orang siswa, (c) guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat.

4.3.5 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Layanan Khusus.

Dalam pelaksanaan pembelajaran Kelas Layanan Khusus perlu di perhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif. Iklim pembelajaran yang kondusif akan mendorong munculnya tingkah laku siswa seperti yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosioemosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif.

Pengelolaan kelas ini mencakup penataan lingkungan fisik, penataan tempat duduk penataan pajangan dan penataan lingkungan psikososial kelas.

1) **Penataan lingkungan fisik kelas.**

Pengelolaan kelas yang efektif bermula dari penataan ruangan kelas dan isinya. Guru hendaknya menata ruangan kelas dan isinya sehingga kelas menjadi lingkungan yang menarik dan efektif untuk belajar. Lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruangan kelas yang menarik, efektif, serta mendukung siswa dan guru dalam pembelajaran. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, guru harus menata tempat duduk dan barang-barang yang ada di ruangan kelas sehingga dapat mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kelas.

Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penataan lingkungan fisik kelas adalah sebagai berikut:

- a) Keleluasaan pandangan (visibility). Hal pertama yang harus diperhatikan guru dalam menata ruangan kelas adalah keleluasaan pandangan (visibility). Artinya, penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru atau benda-benda yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa harus dapat melihat kegiatan pembelajaran dari tempat duduk mereka dengan nyaman
- b) Mudah dicapai (accessibility). Barang-barang yang sering digunakan siswa dalam proses pembelajaran hendaknya diletakkan pada tempat yang dapat

dengan mudah dijangkau oleh siswa yang bersangkutan. Apabila mereka membutuhkannya, mereka tidak perlu meminta bantuan guru untuk mengambilnya. Ruangan hendaknya diatur dengan baik sehingga lalu lintas kegiatan belajar di kelas tidak terganggu. Jarak antar-tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat dengan mudah bergerak dan tidak mengganggu siswa lainnya yang sedang mengikuti proses pembelajaran dimaksud.

- c) Keluwesan (fleksibility). Barang-barang yang ada di dalam kelas hendaknya mudah untuk ditata dan dipindah-pindahkan sesuai dengan tuntutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa dan guru. Penataan ruangan kelas hendaknya sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa.
- d) Kenyamanan. Di samping guru harus menata ruangan kelas sesuai dengan tujuan dan strategi pembelajaran, guru juga dituntut untuk menata lingkungan kelas yang dapat memberikan kenyamanan baik bagi siswa maupun bagi guru sendiri. Prinsip kenyamanan ini berkaitan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Kenyamanan ruangan kelas akan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan produktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran.
- e) Keindahan. Dalam menata ruangan kelas, prinsip keindahan ini perlu diperhatikan. Prinsip ini berkenaan dengan usaha guru menata ruangan kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan berpengaruh positif terhadap sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

2) Penataan Tempat Duduk.

Dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran

yang diterapkan guru menuntut tatanan tempat duduk yang berbeda-beda. Dalam kaitan ini, proses pembelajaran secara klasikal akan berbeda dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan secara kelompok. Dengan kata lain, guru harus menata tempat duduk siswa sesuai dengan kebutuhan dan untuk memperlancar proses pembelajaran.

3) Penataan Pajangan.

Pajangan mempunyai peranan yang penting untuk menjadikan ruang kelas menarik dan membuat peserta didik betah di kelas. Pajangan tersebut dapat berbentuk grafik, gambar, dan hasil karya peserta didik, misalnya: lukisan, kerajinan tangan, dan karangan yang mengandung pesan kependidikan. Pajangan, baik yang dibuat oleh peserta didik atau oleh guru, dapat ditempelkan pada sebuah papan. Pajangan berfungsi sebagai alat pengajaran, antara lain untuk memberikan informasi, memamerkan karya peserta didik, menampilkan soal atau teka-teki, dan mendorong peserta didik bekerja sama. Namun demikian perlu dicermati, bahwa pajangan-pajangan dimaksud seyogyanya harus relevan dengan materi pelajaran pada kelas atau semester yang bersangkutan.

4) Penataan Lingkungan Psiko-sosial Kelas.

Meskipun penataan lingkungan fisik kelas merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan kelas, keadaan lingkungan psiko-sosial kelas juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan kelas yang kondusif bagi pembelajaran. Iklim psikososial kelas dimaksud berkaitan erat dengan hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar-siswa. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta hubungan antar-siswa akan dapat menciptakan iklim psiko-sosial kelas yang sehat, yang efektif bagi berlangsungnya pembelajaran.

Berkenaan dengan pengelolaan iklim psiko-sosial kelas, Bandura menyatakan bahwa keberhasilan guru dalam mengelola iklim psikososial kelas dipengaruhi oleh karakteristik guru itu sendiri. Karakteristik yang harus dimiliki guru demi terciptanya iklim psikososial kelas yang efektif bagi kelangsungan pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Disukai oleh siswa. Apabila siswa telah menyenangi gurunya, maka siswa akan selalu berusaha untuk mengikuti atau menuruti apa yang diharapkan gurunya. Oleh karena itu, salah satu karakteristik yang harus dimiliki guru adalah disenangi oleh siswanya. Beberapa sifat guru yang memungkinkan untuk disenangi ialah periang, ramah, tulus hati, dan mendengarkan keluhan siswa, serta percaya diri.
- b) Memiliki persepsi yang realistik tentang dirinya dan siswanya. Guru yang memiliki pandangan yang tidak realistik terhadap kemampuan siswa dan dirinya dapat menghambat efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki pandangan yang realistik terhadap kemampuan siswa, dengan demikian dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang siswa untuk belajar. Guru yang memandang kemampuan dirinya terlalu rendah memiliki kecenderungan kurang percaya diri. Padahal sikap percaya diri merupakan salah satu sikap guru yang harus dimiliki guru agar dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Sementara itu, guru yang memandang kemampuan dirinya terlalu tinggi akan dapat merenggankan hubungannya dengan siswa. Selain itu, guru harus menerima apa adanya, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki siswa.
- c) Akrab dengan siswa dalam batas hubungan guru-siswa. Untuk mengembangkan hubungan yang baik antara guru-siswa, guru perlu

menyediakan waktu untuk mengenal siswa lebih banyak. Namun perlu diingat bahwa, hubungan yang terlalu dekat antara guru dan siswa perlu dihindari agar siswa tetap menghormati dan menghargai guru sebagai orang tua.

- d) Bersikap positif terhadap pertanyaan/respon siswa. Bagi beberapa guru, pertanyaan yang diajukan siswa seringkali dianggap sebagai ujian. Seolah-olah siswa ingin menguji tingkat penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan. Situasi semacam ini menimbulkan rasa tidak aman pada guru. Sikap positif guru terhadap pertanyaan siswa akan muncul apabila guru memang menguasai materi yang sedang dibahas. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- e) Sabar, teguh, dan tegas. Sebagai guru, kita dituntut untuk sabar. Kadang-kadang siswa selalu ingin menguji kesabaran kita. Apabila kita tidak sabar, siswa akan merasa ketakutan untuk mengajukan masalah yang dihadapi. Selain itu, guru juga harus teguh dan tegas dalam memegang aturan.

Selain dari pribadi guru itu sendiri, iklim psikososial kelas juga dipengaruhi oleh hubungan sosial antarsiswa. Hubungan sosial yang kurang baik antar-siswa dapat mengganggu lancarnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengenal teman-temannya sehingga mereka akan merasa sebagai satu kesatuan. Perasaan semacam itu akan tumbuh pada diri siswa apabila guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan bekerja dalam kelompok.

Berkenaan dengan keterampilan mengelola, terdapat dua komponen keterampilan mengelola kelas yang harus dikuasai oleh guru. (Wardhani dan Julaha, 2002, p. 32) Kedua komponen keterampilan mengelola kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dapat dilakukan dengan cara berikut:
- 1) Menunjukkan sikap tanggap dengan cara: memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, atau memberikan reaksi apabila ada gangguan dalam kelas,
 - 2) Membagi perhatian secara visual dan verbal.
 - 3) Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dan menuntut tanggung jawab peserta didik.
 - 4) Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas.
 - 5) Menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan.
 - 6) Memberikan penguatan bila perlu.
- b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respons guru terhadap respons negatif peserta didik yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini guru dapat menggunakan dua jenis strategi yaitu: modifikasi tingkah laku dan pengelolaan (proses) kelompok.
- 1) Modifikasi Tingkah Laku. Dalam strategi ini terdapat 3 (tiga) hal pokok yang harus dikuasai guru yaitu:
 - mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberi contoh dan bimbingan,
 - meningkatkan munculnya tingkah laku yang baik dengan memberikan penguatan, dan
 - mengurangi munculnya tingkah laku yang kurang baik dengan memberi hukuman.

Ketiga hal ini harus dilakukan guru dengan catatan bahwa pelaksanaan dilakukan segera setelah perilaku terjadi. Demikian pula hukuman, harus diberikan secara pribadi dan tersendiri. Hukuman itu sendiri hanya dilaksanakan guru bila memang diperlukan.

2) Pengelolaan Kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Dua hal yang perlu dilakukan guru adalah:

- memperlancar tugas-tugas dengan cara mengusahakan terjadinya kerja sama dan menetapkan standar serta prosedur kerja,
- memelihara kegiatan kelompok, dengan cara memelihara dan memulihkan semangat, menangani konflik yang timbul, serta memperkecil masalah yang timbul.

Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat enam prinsip berikut:

- Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan.
- Guru dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang peserta didik untuk berpikir.
- Guru dapat menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan.
- Keluwesan guru dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan.
- Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif perlu diperhatikan.
- Penanaman disiplin diri sendiri merupakan modal dasar bagi guru.

Selanjutnya, dalam mengelola kelas, guru hendaknya menghindari hal-hal sebagai berikut:

- Campur tangan yang berlebihan.

- Kesenyapan/penghentian suatu pembicaraan/kegiatan karena ketidaksiapan guru.
- Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pelajaran.
- Penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan disiplin diri.
- Bertele-tele.
- Pengulangan penjelasan yang tak diperlukan.

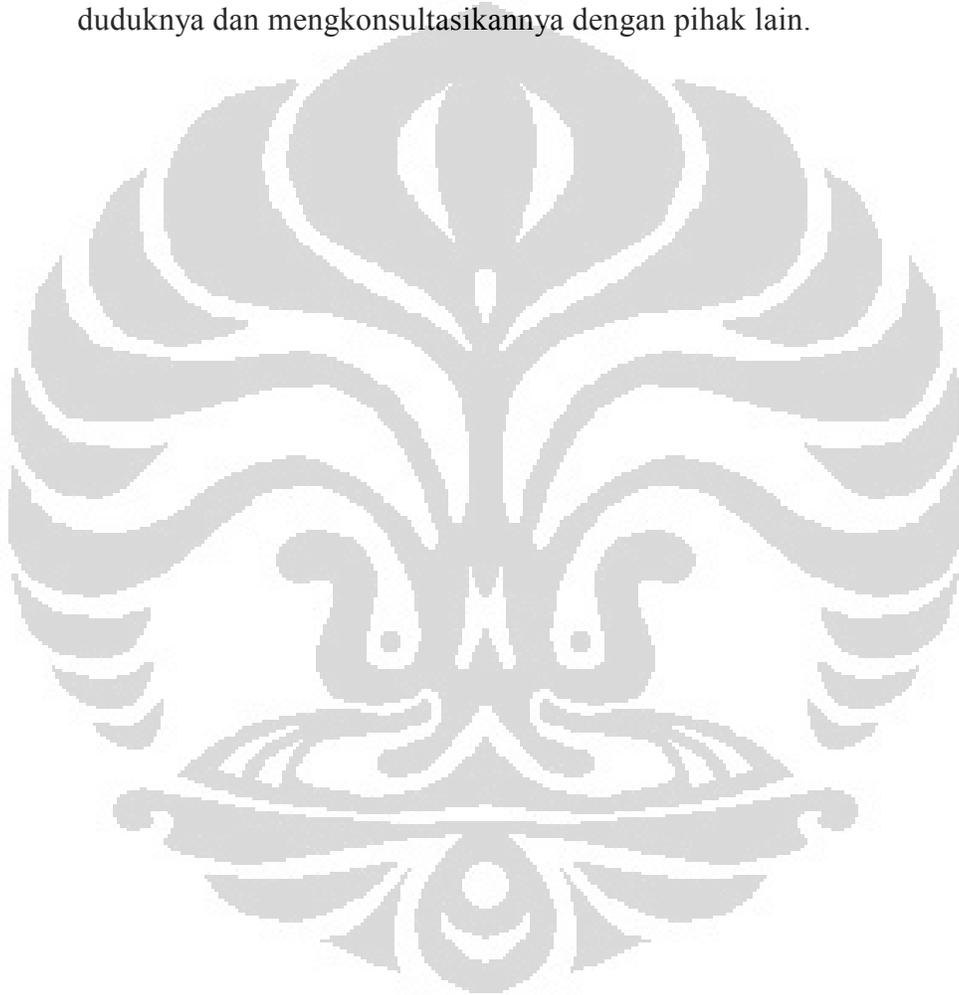
3) Disiplin Kelas

Secara umum, disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan pada aturan yang ditetapkan. Disiplin kelas dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan siswa terhadap peraturan kelas, atau teknik yang digunakan guru untuk membangun atau memelihara keteraturan dalam kelas. Disiplin kelas perlu diajarkan atau ditanamkan kepada siswa karena alasan sebagai berikut: (Wardhani dan Julaeha, 2002, p. 48) (a) agar siswa mampu mendisiplinkan diri sendiri, (b) disiplin yang tinggi akan menuju kepada terciptanya iklim belajar yang kondusif, dan (c) kebiasaan berdisiplin di sekolah diharapkan menghasilkan kebiasaan berdisiplin di masyarakat.

Strategi penanaman disiplin kelas dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: (a) Modelkan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah, (b) Contoh nyata merupakan alat mendidik yang terbaik. Anak-anak SD sangat taat kepada guru dan jauh lebih patuh kepada guru daripada kepada orang tua. Oleh karena itu, guru perlu memodelkan disiplin itu, (c) Adakan pertemuan kelas secara berkala untuk meninjau kembali peraturan yang telah ditetapkan, (d) Terapkan segala bentuk peraturan secara fleksibel (luwes) sehingga siswa tidak merasa tertekan, (e) Sesuaikan penerapan peraturan dimaksud dengan tingkat perkembangan anak, dan (6) Libatkan siswa dalam membuat peraturan kelas.

Sedangkan strategi penanganan disiplin kelas dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Menangani gangguan ringan, dengan cara mengabaikan, menatap agak lama, menggunakan tanda nonverbal, mendekati, memanggil nama, dan mengabaikan secara sengaja.
- 2) Menangani gangguan berat, dengan cara memberi hukuman dan melibatkan orang tua.
- 3) Menangani perilaku agresif, dengan cara mengubah/ menukar teman duduknya dan mengkonsultasikannya dengan pihak lain.



BAB 5

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan mencoba menguraikan hasil evaluasi program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (SD KLK) di Kota Surabaya. Dalam bab ini juga berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus di sekolah dasar pelaksana program tersebut yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan informan-informan terpilih kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam mengevaluasi program Kelas Layanan Khusus melalui dana APBD Kota Surabaya.

Penilaian terhadap bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD menggunakan indikator (1) *contexs* yaitu program, tujuan, dan landasan hukum terkait dengan pelaksanaan program SD KLK, (2) input yaitu karakteristik sekolah, karakteristik guru, karakteristik siswa, kurikulum, sumber dana dan dukungan pemerintah daerah, (3) proses yaitu sosialisasi program, penentuan sekolah pelaksana KLK, rekrutmen siswa, dan pengelolaan program KLK, dan (4) produk yaitu jumlah siswa di kelas reguler, tingkat adaptasi siswa di kelas reguler, dan prestasi siswa di kelas reguler.

5.1. Hasil Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan-informan terkait seperti Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah SDN Dupak I, dan Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364. Dalam pelaksanaan wawancara para informan juga didampingi oleh staf Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan guru-guru program KLK dari masing-masing sekolah sebagai informan pelengkap dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang

dihadapi terkait dengan pelaksanaan program KLK. Dalam upaya mendapatkan informasi yang lengkap peneliti memberikan instrumen sebagai pelengkap untuk mengungkap secara faktual dari responden penelitian.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan KLK Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menekan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan program KLK Sekolah dasar terlaksana cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana efektivitas pemanfaatan kebijakan pendidikan KLK sekolah Dasar dalam upaya menekan angka drop out jenjang sekolah dasar dan mensukseskan program wajib belajar 9 sembilan tahun khususnya di Kota Surabaya. Sesuai operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan wawancara peneliti berpijak pada evaluasi program model CIPP yaitu *Contex, Input, Proses, dan Product*.

Pertama, aspek *contexs* dalam pelaksanaan program SD KLK, walaupun tidak ada pernyataan khusus terkait dengan *contexs* program SD KLK diketahui bahwa baik Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maupun Kepala Sekolah dan guru-guru menyadari betul tentang tujuan, dasar pelaksanaan dan manfaat program SD KLK sebagai salah satu solusi untuk menekan angka putus sekolah anak-anak usia sekolah dasar kembali ke sekolah hingga dapat menyelesaikan sekolah dasar. Petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, dan Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364.

Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“masyarakat sudah mengetahui program ini sehingga banyak pihak yang mendukung”

“sebelum membahas anggaran program dengan DPRD biasanya saya mengajak dulu anggota dewan ke tempat atau lokasi program, sehingga

anggota dewan bisa memahami tujuan dan sasaran program tersebut, sehingga pembahasan di dewan menjadi lebih mudah”.

(Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011 dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya).

Terkait aspek *contex* hasil analisisnya instrumen yang disampaikan kepada responden, dapat dijelaskan bahwa program SD KLK memiliki tujuan agar anak-anak usia Sekolah Dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah memperoleh pendidikan di Sekolah Dasar sampai tamat. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk membantu peserta didik menyiapkan diri secara psikologis, sosiologis, dan akademis untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Oleh sebab itu, pada dasarnya pelaksanaan SD KLK telah memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden secara umum Kepala SDN Dupak I dan Kepala SDN Banyu Urip III/364 telah mengetahui tujuan dari pelaksanaan program SD KLK. Hal ini cukup beralasan karena program SD KLK telah disosialisasikan secara luas baik kepada pengelola maupun stakeholder yang ada. Bahkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Aparat Pemerintah memahami betul program ini.

Petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan SD KLK, bahwa sasaran program SD KLK adalah anak-anak usia Sekolah Dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah di Indonesia. Sedangkan kriteria sasaran secara khusus ditujukan bagi anak-anak usia 8-14 tahun, belum bersekolah atau telah putus sekolah minimal 1 (satu) tahun karena alasan ekonomi, memiliki orang tua/wali dan tempat tinggal yang tetap, dan tergolong anak normal bukan anak berkelainan mental. Dilihat dari sasaran serta kriteria tersebut sangat jelas bahwa program SD KLK memiliki sasaran yang cukup jelas, hal ini sangat membantu pengelola SD KLK dalam menentukan dan memilih peserta didiknya. Sesuai hasil informasi dari responden SDN Dupak I dan Kepala SDN Banyu Urip III/364 menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru memahami dan mengetahui sasaran serta kriteria peserta didik bagi program SD KLK, serta berpendapat bahwa program SD KLK dapat membantu

mengurangi jumlah anak putus sekolah dan mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Sedangkan ditinjau dari manfaat program terhadap keberhasilan dalam mentuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun informan dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru berpendapat bahwa program SD KLK akan membantu mempercepat mentuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar.

Landasan hukum bagi pelaksanaan program SD KLK secara jelas telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1): “Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49: “Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. Berdasarkan landasan hukum tersebut maka program SD KLK memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilaksanakan dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan, memberikan kesempatan bagi anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan, serta legalitas terhadap orang tua yang wajib memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan.

Kedua, dari segi input dalam pelaksanaan program SD KLK dapat ditinjau dari karakteristik sekolah, karakteristik guru, karakteristik siswa, kurikulum, sumber dana dan dukungan pemerintah daerah. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Mengenai karakteristik sekolah Eko Prastyoningsih, mengungkapkan yaitu:

“kami laksanakan mulai dari rekrutmen Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dipesan tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diseleksi. Kemudian yang terpilih diundang melalui undangan dinas. Saya mengumpulkan Kepala

Sekolah sebelum di SK kan, jadi saya motivasi dulu, apakah kepala sekolah mau membantu program ini, sehingga berhasil. Karena kalau tidak ditangani dengan baik, kemudian diperlakukan dengan tidak baik maka akan memperparah psikologinya anak, jadi program ini bukan hanya mengumpulkan anak-anak DO namun benar-benar untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga benar-benar mau sekolah". (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Selain itu, sesuai karakteristik sekolah pelaksana program SD KLK yang diperoleh melalui analisis instrument diketahui bahwa karakteristik sekolah yang menjadi pelaksana program SD KLK ditinjau dari 3 (tiga) hal, yaitu (1) ketersediaan calon siswa KLK, (2) ketersediaan ruang kelas, dan (3) daya tampung kelas reguler. Hasil analisis terhadap ketiga indikator tersebut, disajikan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Calon Siswa Program SD KLK

Ketersediaan calon siswa KLK merupakan bagian penting bagi terlaksananya program SD KLK di suatu sekolah. Ketentuan yang disyaratkan adalah sekolah pelaksana program SD KLK harus memiliki minimal 20 siswa KLK. Oleh sebab itu, ketersediaan calon siswa menjadi salah satu kriteria sekolah pelaksana program SD KLK.

Berdasarkan data jumlah siswa KLK di SDN Dupak I dan SDN Banyu Urip III/364, tersebut diketahui bahwa masih banyak anak usia sekolah yang memerlukan kelas layanan khusus. Data ketersediaan calon siswa tersebut menurut pengelola SD KLK dijelaskan bahwa siswa KLK di SDN Dupak I sebanyak 24 siswa dan SDN Banyu Urip III/364 sebanyak 22 siswa. Ditinjau kesanggupan sekolah untuk melaksanakan program KLK, diketahui bahwa kedua sekolah sanggup untuk menerima siswa KLK. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesanggupan sekolah menerima siswa calon KLK cukup tinggi, sesuai dengan kemampuan pengelolaan dalam mencari calon siswa KLK, serta menunjukkan sekolah pelaksana program SD

KLK berada di lokasi dekat dengan konsentrasi anak-anak yang belum bersekolah atau putus sekolah.

b. Ketersediaan Ruang Kelas.

Ketersediaan ruang kelas merupakan salah satu kewajiban pengelola SD KLK untuk membuka KLK. Ketentuan sekolah yang akan melaksanakan program SD KLK harus memiliki minimal 3 (tiga) ruang kelas yang dapat dipergunakan untuk proses belajar mengajar KLK. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ruang kelas untuk pelaksanaan KLK di kedua sekolah menggunakan dari tiga ruang kelas. Hal ini dilakukan karena setiap sekolah menggunakan model pendekatan kelas kelompok A, B, dan C, dengan uraian bahwa Kelompok A digunakan oleh kelas 1 dan 2, Kelompok B terdiri dari kelas 3 dan 4, sedangkan Kelompok C digunakan oleh kelas 5 dan 6.

Setiap sekolah pelaksana program SD KLK menunjukkan bahwa semua gedung SD hanya digunakan satu sekolah. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran antara kelas reguler dan KLK setiap sekolah berbeda, yaitu semua sekolah penyelenggara KLK melaksanakan kelas reguler di pagi hari dan penyelenggaraan KLK dilaksanakan pada sore hari.

c. Daya Tampung Kelas Reguler

Selain ruang kelas dalam pelaksanaan SD KLK, bahwa hal penting lainnya adalah menyiapkan daya tampung kelas reguler sebagai tempat untuk siswa setelah dinyatakan layak untuk masuk kelas reguler. Oleh sebab itu salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon sekolah yang akan menyelenggarakan KLK adalah daya tampung kelas reguler.

Keadaan daya tampung siswa reguler untuk setiap sekolah cukup bervariasi. Daya tampung ini dilihat berdasarkan selisih antara daya tampung ruang kelas dengan jumlah siswa yang ada. Selisih tersebut menunjukkan seberapa besar daya tampung kelas reguler untuk dapat menerima siswa KLK yang akan masuk di kelas reguler.

Hal ini diperlukan agar siswa yang telah siap memasuki kelas reguler dapat tertampung di kelas-kelas reguler sesuai tingkatan kelasnya. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki daya tampung yang cukup untuk menerima siswa-siswa transfer dari program KLK. Untuk mengantisipasi jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa dimungkinkan adanya hubungan (*link*) dengan sekolah lain untuk menampung siswa KLK yang akan ditangani di kelas reguler. Data ini menunjukkan bahwa setiap sekolah pelaksana KLK dapat memasukkan siswa KLK yang akan masuk di kelas reguler di sekolah lain yang terdekat, jika di kelas reguler pada sekolah tersebut tidak dapat menampung lagi. Namun untuk sekolah yang tidak mempunyai *link* dengan sekolah lain karena pada sekolah tersebut masih cukup mampu untuk menampung siswa KLK yang akan masuk ke kelas reguler.

Karakteristik guru SD KLK merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan program SD KLK, Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“guru SD KLK harus memiliki pengalaman yang cukup karena mereka akan berhadapan dengan siswa yang memiliki masalah di lingkungannya sehingga perlu memiliki kesabaran dan strategi yang tepat dalam menangani siswanya”

“Karena kepedulian kita kepada anak-anak, keberhasilan program ini tergantung pada guru-gurunya juga, karena biasanya anak DO itu disebabkan ada masalah di dalam” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang karakteristik guru SD KLK antara lain:

“guru SD KLK harus memiliki pengalaman PAUD, Kejar Paket, kelebihan dalam teknis pembelajaran, kesabaran, punya kemampuan cara mengajar

dengan menggunakan metode enjoy learning (belajar yang menyenangkan) sehingga mampu menangani berbagai masalah dalam pembelajaran di kelas” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami M sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364, tentang karakteristik guru SD KLK antara lain:

Guru dipilih oleh kepala sekolah, sesuai kemampuan guru (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Selain itu, sesuai karakteristik guru pelaksana program SD KLK yang diperoleh melalui analisis instrumen diketahui bahwa karakteristik guru pada SD KLK harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) berasal dari SD penyelenggara KLK, (2) diutamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), (3) berpengalaman mengajar di Sekolah Dasar minimal 5 (lima) tahun, dan lulus seleksi. Selain karakteristik tersebut guru KLK telah dibekali dengan pelatihan, sehingga para guru tersebut telah siap untuk memberikan pembelajaran pada program SD KLK. Jumlah guru KLK yang terlibat pada setiap sekolah masing-masing 3 guru,

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui secara umum karakteristik guru KLK cukup memadai untuk melaksanakan pembelajaran pada program SD KLK. Walaupun masih ada yang berpendidikan setingkat SLTA namun ternyata didukung oleh lamanya pengalaman dalam mengajar, sehingga para guru tersebut telah memiliki kesiapan untuk memberikan pembimbingan dan pengajaran bagi siswa KLK yang pada dasarnya memiliki karakteristik cukup heterogen.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada umumnya guru KLK mengajar pada kelas reguler pada pagi hari, yaitu rata-rata mulai pukul 07.00 sampai dengan 12.30. Sedangkan pelaksanaan kegiatan mengajar pada program KLK dilakukan pada siang hari. Pada umumnya semua guru yang mendapat tambahan beban tugas sebagai guru KLK, tidak mengalami masalah, karena dapat membagi waktu, serta telah memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama.

Sedangkan guru non KLK merupakan guru yang mengajar siswa KLK di kelas reguler. Guru-guru tersebut memberikan pelajaran mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, ditambah guru agama dan pendidikan jasmani.

Karakteristik siswa SD KLK sebagai sasaran utama perlu diperhatikan sehingga sesuai dengan tujuan program SD KLK. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“Enggak, lah nanti kalau dibatasi gimana, kalau ternyata di lingkungan sekitar sekolah itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Tidak ada pembatasan karakteristik, sedangkan kalau dibatasi nanti gimana, karena untuk mencapai penuntasan drop out sehingga yang tidak terpenuhi oleh APBN dikasih melalui APBD. Memuntut anak-anak yang semula drop out supaya dapat kembali bersekolah.”

“Lingkungan SD Dupak itu kan lingkungan nggone wong rombeng-rombeng, kalau Banyuurip itu kan nggone lingkungane wong nakal-nakal. Kalau kita kan bukan bagaimana menjaring murid banyak tetapi kalau memang disana ada murid yang drop out karena kasus keluarga, kasus sosial yang kaya begitu kan. Dimana ada anak-anak yang begitu bagaimana kita jaring, bukan kuantitasnya ya tetapi bagaimana kualitasnya” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364, tentang karakteristik siswa SD KLK antara lain:

“batasan usia anak KLK yang ada umur 8 sampai dengan 14 tahun, sehingga membuat kami mesti cepat-cepat memasukan anak KLK yang usianya hampir 14 tahun ke dalam kelas reguler, sementara anaknya belum bisa beradaptasi dengan kelas reguler” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berdasarkan hasil analisis instrumen yang diisi responden diketahui pada dasarnya karakteristik siswa program SD KLK, secara umum telah memenuhi kriteria seperti, yaitu: (1) berumur antara 8 sampai 14 tahun, (2) belum bersekolah atau telah putus sekolah minimal 1 (satu) tahun karena alasan ekonomi, (3) memiliki orang tua/wali dan tempat tinggal tetap, dan (4) tergolong anak normal bukan anak berkelainan mental. Hal ini sesuai dengan data di SDN Dupak I dan SDN Banyu Urip III/364 diketahui bahwa semua siswa KLK yang direkrut pengelola memenuhi kriteria tersebut.

Kurikulum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran pada program SD KLK, karena kurikulum menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang kurikulum program SD KLK.

“Kurikulumnya yang digunakan mengadopsi dari kurikulum yang dikembangkan Direktorat Pembinaan TK dan SD, kemudian kita tambahkan yang sesuai kondisi daerah, karena yang dari pusat itu umum, kalau disini ini sesuai dengan lingkungannya, karena psikologi anak itu kan berbeda contoh di daerah Tambakwedi daerah nelayan, di Wonokusumo berbeda, daerah Pegirian berbeda juga. Kurikulumnya tematik dan kepala sekolah mengembangkan sesuai tingkat kelasnya anak-anak, sesuai tingkat kelas berapa anak DO, melihat kasusnya anak per anak dulu, karena anak-anak kadang-kadang mengaku kelas 5 namun belum bisa apa-apa” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang kurikulum SD KLK antara lain:

“Kurikulum bertumpu ke kurikulum regular dan bertumpu pada kemampuan siswa, ditambah kreativitas saya (guru) sendiri dengan life skill, sehingga mendapat kemampuan lebih untuk hidupnya. Selain itu pembekalan mental, keseimbangan antara materi pembelajaran dan bekal kehidupan siswa, serta kegiatan kurikuler tentang drama, musik, melibatkan pada acara pekan budaya, sehingga siswa punya kebanggaan untuk bangkit kembali, untuk motivasi siswa belajar” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364, tentang kurikulum SD KLK antara lain:

Sama dengan kurikulum reguler tapi perbandingannya kalau kurikulum reguler 100%, untuk yang KLK sekitar 60%. Sedangkan kelasnya menggunakan kelas rangkap, kelas 1,2 dan 3 satu kelas, kelas 4, 5 dan 6 satu kelas. Disini kita jadikan satu karena jumlah anaknya sekarang tinggal 16, hanya dikelompokan, kebetulan kelas 6 juga ndak ada. Paling tinggi kelas 5, kita ikutkan tari, kalau ada anak-anak yang pagi, olahraga kita gabungkan biar tidak minder. Pramuka juga kita ikutkan sehingga nanti kalau kita regulerkan nggak merasa minder ” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berdasarkan hasil analisis terhadap responden guru tentang penggunaan kurikulum pada program SD KLK, bahwa kurikulum yang sama dengan kurikulum yang diberikan kepada siswa reguler dan kurikulum program SD KLK yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Hal ini memberikan otonomi terhadap guru dan sebagai upaya untuk mengejar taraf kesetaraan pengetahuan setiap siswa agar mampu beradaptasi di kelas reguler.

Untuk membantu meningkatkan kreativitas siswa program SD KLK, sebagian guru memberikan kegiatan tambahan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler seperti: (1) kegiatan olah raga, (2) kegiatan pramuka, dan (3) kegiatan kesenian. Selain itu untuk memberikan kemampuan beradaptasi yang cukup terhadap setiap siswa

program SD KLK, maka pengelola mengikutsertakan siswa program SD KLK bersama siswa reguler dalam bentuk kegiatan: (1) peringatan hari-hari besar nasional, (2) upacara bendera, (3) kegiatan olah raga, dan (4) kegiatan lomba, namun ada juga beberapa pengelola yang belum mengikut sertakan siswa program SD KLK dengan siswa regulernya.

Sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraan program SD KLK terdiri dari dana APBN dan APBD. Namun pada penelitian ini fokus pada sumber dana APBD. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang sumber dana program SD KLK.

“Sumber dana untuk program Kelas Layanan Khusus Sekolah Dasar ini dari dana APBD murni, tidak ada dari CSR atau pihak lain, murni APBD, sekolah gratis, jadi tidak ada apa-apa semuanya dari APBD, penyaluran dana ditransfer langsung ke sekolah, sedangkan untuk bantuan paket pakaian atau perlengkapan siswa dilelangkan karena jumlahnya banyak, anak-anak diukur bajunya, jadi pemenang lelang diberi ukuran, sekolah disuruh mendata”.

Anggaran tahun 2011, membuat anggaran untuk anak-anak yang tidak mampu membeli pakaian seragam anak-anak karena tahun 2010 ini saya sampai minta-minta untuk menangani kasus ini, termasuk yang gak bisa membayar uang sekolah, ijazahnya gak ketebus. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang sumber dana program SD KLK antara lain:

“pendanaan seratus persen dari APBD, sementara belum menyentuh ke masyarakat, tapi kami mengharapkan solusi bersama dengan masyarakat”
(Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364, tentang sumber dana program SD KLK antara lain:

“pertama dari sekolah, baru diganti setelah masuk dananya. Bajunya Juli, peralatan baru Desember sehingga di talangi oleh sekolah dulu, diberikan plastik yang ada tutupnya dulu yang diisi buku, pensil rautan. Dari masyarakat gak ada, karena gratis, jadi gak berani karena narik uang dah didatangi wartawan, sehingga gratis.”

“Selain dari APBD juga memberikan alat tulis, baru kemarin malah kita dapat penggantian dari Dinas untuk seragam, kegiatan belajar mengajar sudah dari Maret, bajunya Juli baru dikasihkan. Peralatannya baru Desember, itu sekolah semua yang memberikan. Dari masyarakat gak ada, gak berani, disamping lingkungannya juga tidak mampu, dengan adanya dana BOS dan BOSDA juga sudah tidak boleh”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berdasarkan hasil analisis instrumen dapat diketahui bahwa sumber dana penyelenggaraan program SD KLK bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Kota Surabaya, selain itu telah dialokasikan dana pendamping untuk membantu pendanaan bagi siswa yang telah masuk kelas reguler, dan beberapa sekolah membantu siswa di kelas reguler berasal dari dana BOS. Dana penyelenggaraan KLK yang diterima sekolah terdiri dari: (1) dana bantuan penyelenggaraan; dan (2) dana bantuan pembelian paket belajar siswa. Secara umum sekolah pelaksana KLK telah menerima dana bantuan program SD KLK. Dana penyelenggaraan merupakan dana tetap, sehingga besarnya sama untuk semua sekolah. Dana penyelenggaraan ini dialokasikan untuk pengganti transport pengelola, buku perpustakaan, dan administrasi.

Pelaksanaan program SD KLK tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari sumber dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program SD

KLK bersumber dari APBD Kota Surabaya. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“Ketua Komisi D memberikan SMS data anak DO, ketua DPRD memberikan data dan aku langsung memverifikasi anak tersebut, dan menyampai ke Kepala Sekolah penyelenggara sekolah untuk mencari anak tersebut dan dimasukkan”

“memang kepedulian lingkungan harus kita libatkan, termasuk Dewan, Ketua Komisi D itu sering SMS ke saya..”

Hasil analisis terhadap instrument yang diisi responden dapat diketahui bahwa pelaksanaan program SD KLK merupakan program yang dilaksanakan melibatkan berbagai instansi terkait. Untuk pelaksanaan di Kota Surabaya telah dijadikan program pembangunan pendidikan Kota Surabaya, dengan peran aktif Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai pembina. Peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam pembinaan berperan dalam melakukan supervisi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan KLK, serta memfasilitasi administrasi pelaksanaan KLK. Sedangkan dalam penanganan siswa KLK yang telah transfer di kelas reguler dilakukan dalam bentuk pantauan terhadap keberlanjutan kegiatan belajarnya.

Ketiga, dari segi proses dalam pelaksanaan program SD KLK dapat ditinjau dari aspek sosialisasi program, penentuan sekolah pelaksana KLK, rekrutmen siswa, dan pengelolaan program KLK. Sosialisasi pelaksanaan program SD KLK merupakan upaya menginformasikan program SD KLK bagi semua *stakeholders* pendidikan. Sasaran sosialisasi antara lain anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) tingkat II Kota Surabaya, aparat pemerintah (Camat dan Lurah), masyarakat, guru, kepala sekolah, dan siswa-siswa. Sosialisasi ini selain mengenalkan program SD KLK, juga mengajak kepada semua pihak terutama orang tua siswa yang memiliki anak usia sekolah dasar namun tidak bersekolah. Dalam pelaksanaan

sosialisasi dan pengelolaan program SD KLK, secara umum melibatkan guru-guru KLK, akan tetapi ada beberapa sekolah juga melibatkan guru Non KLK, dalam bentuk kegiatan rekrutmen siswa, membantu mengajar di KLK, dan bimbingan belajar bagi siswa -siswa KLK.

Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang sosialisasi program SD KLK.

“Sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari RT, RW. Pelaksanaan sosialisasi ini kami laksanakan mulai dari rekrutmen Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dites tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diseleksi. Kemudian yang terpilih diundang melalui undangan dinas. Saya mengumpulkan Kepala Sekolah sebelum di SK kan, jadi saya motivasi dulu, apakah kepala sekolah mau membantu program ini, sehingga berhasil. Karena kalau tidak ditangani dengan baik, kemudian diperlakukan dengan tidak baik maka akan memperparah psikologinya anak, jadi program ini bukan hanya mengumpulkan anak-anak DO namun benar-benar untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga benar-benar mau sekolah”.

“Sosialisasi kepada orang tua juga kita lakukan, karena ada anggapan “anakku terlanjur bodoh dadi gak usah tak sekolahno” kita beri pengertian “Pak nek anakmu ora sekolah trus njenengan mati itu nanti malah menjadi beban” akhirnya mereka sadar dan mau menyekolahkan anaknya” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011)

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang sosialisasi program SD KLK dilakukan melalui:

“turun ke lapangan menginformasikan ke masyarakat, menurut saya mudah-mudahan ini merupakan terobosan bagi pemerintah. Selain itu masyarakat

membantu memberikan informasi yang belum terjangkau, orang tua mendukung memberi support, seperti hadir dalam pertemuan” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011)

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364, tentang sosialisasi program SD KLK antara lain:

“Sosialisasi disampaikan kepada guru-guru di lingkungan sekolah, dan guru menyampaikan informasi tentang program SD KLK sekaligus disaat rekrutmen sehingga program ini dapat diketahui oleh masyarakat terutama para RT, RW maupun perangkat desa” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011)

Dalam pelaksanaan rekrutmen siswa pada umumnya di setiap sekolah telah melibatkan guru KLK dan kepala sekolah. Berdasarkan pendapat kepala sekolah menunjukkan bahwa dalam merekrut siswa KLK pada umumnya melibatkan semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan. Komponen-komponen yang terlibat antara lain pengelola KLK yang ada di sekolah, guru-guru KLK dan juga guru-guru non-KLK. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melibatkan semua unsur/komponen yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Lebih lanjut bahwa dalam rekrutmen siswa KLK, sekolah juga melibatkan aparat pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar sekolah. Aparat pemerintah yang dilibatkan dalam rekrutment siswa KLK mulai dari aparat RT/RW, kepala desa/lurah dan camat. Selain itu warga dan tokoh masyarakat juga diminta informasi dan keterangannya tentang anak-anak usia sekolah yang belum sekolah atau putus sekolah. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang akurat tentang kondisi dan keberadaan anak-anak warga masyarakat sekitar, sehingga dengan informasi dan data tersebut diharapkan semua anak-anak pada usia wajib belajar dapat bersekolah.

Beberapa metode yang dilakukan untuk rekrutment siswa KLK, antara lain:

(1) Mencari siswa dari pintu ke pintu, (2) Meminta data ke RT/RW dan Lurah serta

mendatangi siswa tersebut, (3) Mencari siswa pada tempat-tempat mereka bekerja, (4) Membuat pengumuman dan menunggu pendaftaran, dan (5) Minta informasi dari pemuka dan warga masyarakat. Cara-cara tersebut dirasakan cukup efektif, sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan program SD KLK, dan terbukti dengan terpenuhinya kuota yang ditetapkan oleh setiap sekolah. Secara umum hampir semua guru KLK mengetahui tempat tinggal siswa KLK, serta adanya komunikasi dengan orang tua siswa yang sebagian besar dilakukan oleh guru KLK.

Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang rekrutmen siswa program SD KLK.

“Saya sampaikan kepada kepala sekolah “Pokoknya rekrut saja sebanyak-banyak karena untuk menuntaskan anak DO tersebut”. Contohnya ada pak Camat yang bagus, Pak Camat Kenjeran. Pak Pomo itu ngirimkan terus siswa ke kita, kadang beliau membuat laporan ke saya bahwa telah menemukan anak calon siswa KLK sekian. Semua camat mendapat himbauan dari walikota, Pak Walikota pada waktu kita presentasi kemudian membuat himbauan ke para camat. Memang kepedulian lingkungan harus kita libatkan, termasuk Dewan, Ketua Komisi D itu sering SMS ke saya “menemukan anak disini” kemudian saya dari informasi Dewan itu memerintahkan Dinas ke alamat tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang rekrutmen siswa program SD KLK dilakukan dengan cara:

“Guru beserta jajaran ke lapangan, lewat kelurahan, kecamatan diajak ke sekolah, turun ke lapangan secara langsung mendata sendiri dengan

rangsangan untuk diberi konsumsi, seragam, sehingga memiliki kemauan sekolah”

“yang sulit anak-anak pengamen karena sudah memiliki penghasilan, saya sering ke perempatan untuk menemui anak-anak pengamen, jam dinas kosong turun ke lapangan bicara langsung” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang rekrutmen siswa program SD KLK.

“perekrutan mulai awal Januari kemudian mulai eksis Maret, karena Januari-Februari itu kan masih mengumpulkan mendata”.

“para guru pengajar KLK dan Guru yang non KLK bekerja sama bahu-membahu dalam mencari siswa KLK. Saya membuat surat tugas buat mereka sebagai pengantar kepada Pak RT dan Pak RW bahwa mereka ditugaskan untuk mencari siswa putus sekolah atau yang tidak mampu belum pernah sekolah sama sekali. Setelah itu form yang kita terima, kita jadikan biodata.”

Setelah kita menerima laporan dari teman-teman guru maka orang tuanya kita buat surat undangan, kita kumpulkan, kita berikan pengarahan” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Penyelenggaraan program SD KLK sesuai hasil analisis instrumen diketahui bahwa pemahaman guru terhadap penyelenggaraan program SD KLK adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat beradaptasi dengan siswa reguler dengan cara merubah sikap, mental, emosional dan sosial siswa KLK.

Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang penyelenggaraan program SD KLK.

“Ada kebiasaan terkait kultur lingkungan, misalnya di sekitar SDN Tambakwedi (APBN) setiap hari (musim sepak bola hilang mesti dicari-cari lagi)

Di daerah Pegirian kasusnya anak itu malam jumat mereka ilang kabeh soalnya mereka ngemis, mereka bawa air karena disitu ada makam, ngetutno orang yang mau nyekar, meskipun mau diganti uang nggak mau, ayo sekolah yuk nanti tak kasih uang, mereka enggak mau, karena orang tuanya juga begitu, Kamis minta agak siang, agak dini, karena sore sudah mulai kerja nguber-nguber orang yang ziarah, bersihkan rumput-rumput”

“Pembiasaan, karena tuntutan orang tuanya, sekarang kalau kita bahas, siapa sih anak-anak kalau dilengkapi kebutuhannya, kebutuhannya akan sekolah, makannya dan sebagainya, kan semua anak kepingin. Kadang kalau melihat TV kan mereka melongo-melongo, karena mereka kepingin punya ini, punya ini, punya itu, punya sepeda, mereka kadang sampai ndlongop-ndlongop melongo-melongo, artinya dia juga pengen seperti itu. Itu keminderan yang terselubung menurut saya, suatu saat kalau anak-anak seperti itu, maka akan memuncak dan akan memprotes, dia dengan keadaannya sendiri manut-manut akan muncul sendiri ketika permasalahan itu sudah terlalu memuncak, akhirnya bisa menentang orang tuanya, anak-anak itu kan gak ada kata-kata sopannya. Dan anak-anak itu kan sama seperti orang dewasa, punya rasa stress, suatu saat menjadi orang dewasa menjadi orang pendendam, orang iri, orang dengki, karena sedari kecil dia merasa aku ini gak pernah enak dari kecil hingga dewasa, akan menyalahkan siapa saja, apa lagi jadi berhasil akan semena-mena, duniaku yg hilang gak akan kebeli dengan uang yang ada. Jadi bagaimana dunia yang ada jangan sampai hilang, sehingga mereka tidak merasa dunianya hilang. Suksesnya

setelah dewasa banyak dunia yang hilang, mereka merasa bahwa kamu anaknya sejak kecil aku kan baru sekarang. Orang berhasil tapi jiwanya masih jahat, iri dengki, menurut saya masih seperti itu. Makanya bagaimana caranya agar anak-anak itu tumbuh normal, masanya anak-anak ya anak-anak, masanya remaja ya remaja, masanya dewasa ya dewasa, dia bisa merasa bahwa aku ini sudah dewasa bukan menjadi anak-anak. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang pelaksanaan program SD KLK terkait sikap siswa, mengungkapkan bahwa:

“Anak-anak masih mengikuti alur orang tua, jadi kalau bekerja gak sekolah, sehingga diberikan pengertian pembagian waktu” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Hal ini didukung oleh pendapat Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364 terkait masalah sikap siswa dalam pelaksanaan program SD KLK:

“Sulitnya merubah sikap, moralnya, karena udah kelewat jadi susah. Banyak yang gak hadir, jadi kesepakatannya 5 hari, 15.30 s.d 17.30. Siswa yang gak hadir maka Saya kerumahnya, enteng jawabnya malas, orang tuanya menikah lagi, padahal udah di kasih baju, dan sepatu” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Model pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru umumnya mengikuti model rangkap kelas sesuai juknis program SD KLK, yaitu Kelas A untuk kelas terdiri atas kelas I dan II, Kelas B terdiri atas kelas III dan IV, dan Kelas C terdiri dari kelas V dan VI. Dari hasil observasi di SDN Dupak I dan SDN Banyu Urip III/364 menunjukkan bahwa kedua sekolah merujuk pada aturan tersebut. Seorang guru memegang dua kelas sesuai model kelas paralelnya. Dalam proses pelaksanaan

kegiatan pembelajaran untuk SD KLK, setiap guru pada umumnya menggunakan kelas terpisah satu dengan lainnya. Jumlah guru yang terlibat dalam kegiatan KLK ini setiap sekolah ditunjuk 3 orang guru, sedangkan jumlah siswa disesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan, namun tidak ada pembatasan kuota. Kegiatan pembelajaran pada siang hari sampai sore hari di luar jadwal kegiatan belajar mengajar kelas reguler. Kegiatan pembelajaran dilakukan selama 5 hari dalam seminggu.

“Kelasnya menggunakan kelas rangkap, kelas 1,2 dan 3 satu kelas, kelas 4, 5 dan 6 satu kelas. Disini kita jadikan satu karena jumlah anaknya sekarang tinggal 16. Hanya dikelompokan, kebetulan kelas 6 juga ndak ada. Paling tinggi kelas 5”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

Untuk membantu meningkatkan kreativitas siswa KLK, sebagian guru memberikan kegiatan tambahan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler seperti: (1) kegiatan olah raga, seperti pimpong, (2) kegiatan pramuka, dan (3) kegiatan kesenian, seperti senam lantai dan tari.

“Rencana kedepan akan bekerjasama dengan universitas, dari ITS Bina Lingkungan (Tunas Hijau) untuk pencinta alam, setelah pagelaran seni, sehingga anak-anak dapat mengenal lingkungannya” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Dupak I).

“Kita ikutkan tari, kalau ada anak-anak yang pagi, olahraga kita gabungkan biar tidak minder. Pramuka juga kita ikutkan sehingga nanti kalau kita regulerkan nggak merasa minder gitu loh” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

Terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada KLK dalam bentuk (1) kemampuan siswa yang rendah dalam kemampuan membaca,

menulis dan berhitung, (2) kurang disiplin dalam belajar, baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, maupun dalam membuat PR, dan (3) lemahnya dalam mengikuti pembelajaran sehingga memerlukan kegiatan pembelajaran remedial dan kesabaran dalam memberikan pembelajaran.

“Memberi pengarahan untuk telaten, kalau gak kita yang memperhatikan susah karena orang tuanya dari dulu kurang perhatian terhadap pendidikan, lebih baik jualan membantu orang tua”

“Kalau mereka gak masuk 2 atau 3 hari didatangi kerumahnya, karena malu, karena ketemu temen lama, badannya besar, akhirnya dibujuk untuk masuk lagi”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

Pelaksanaan pengalihan siswa KLK ke kelas reguler dilakukan setelah siswa KLK dinyatakan layak dan mampu untuk masuk di kelas reguler. Proses pengalihan siswa KLK ke kelas reguler dilaksanakan berdasarkan pengamatan dan tes. Bentuk tes yang dilaksanakan meliputi tes menulis, berhitung dan membaca. Sedangkan pengamatan yang dilakukan yaitu meliputi perubahan sikap, motivasi dan minat siswa KLK untuk belajar lebih baik. Kemudian guru KLK dan non KLK juga berperan untuk memperkenalkan siswa KLK memasuki kelas reguler dan memperlakukannya sama dengan siswa lainnya.

Pelaksanaan kegiatan KLK memerlukan pengelolaan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi lainnya. Dalam pengelolaan keuangan sekolah hanya menerima uang transport, sedangkan paket belajar diterima dalam bentuk barang. Hal ini seperti disampaikan oleh Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“gak ada honor Guru dan Kepala Sekolah hanya transport Rp.25.000,-/hari efektif, jadi 25 hari efektif kali Rp25.000, 5 Guru + 1 Kepala Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah sama”

Problematika lebih pada disesuaikan dengan keadaan daerah, Memberikan dana sekian harus lelang, honor gak boleh, hanya bentuk transport, koordinasi dengan UPLK guru dan Kepala Sekolah”

“Diberi paket pakaian seragam lengkap semuanya, alat tulis buku pensil. Anak-anak diukur, didata kemudian datanya diserahkan kepada pemenang lelang”. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011)

“paket belajar di kasih dari dinas, laporan ke dinas. Untuk difoto aja mesti dirayu,

Ukuran baju siswa, ini arsipnya, (lengkap buku, penggaris, rautan, pinsil, buku gambar)

Ini barang-barang yang kami belikan lengkap, alat tulis, penggaris, rautan, gunting, sumbangan dari guru-guru. Agar mereka kerasan” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

Meskipun program SD KLK telah berjalan cukup efektif oleh sekolah penyelenggaraan KLK, namun masih menyimpan beberapa kelemahan dan kendala. Oleh karena itu, berikut ini disarikan beberapa kendala, harapan dan saran terhadap penyelenggaraan KLK baik yang dijarah dari guru maupun kepala sekolah penyelenggara KLK.

1). Kendala

Kendala yang dirasakan dan terjadi di sekolah dalam penyelenggaraan KLK dapat dirangkum sebagai berikut:

a). Berkaitan dengan Siswa

- 1) Kehadiran siswa dan minat belajar siswa kurang optimal,
- 2) Anak yang memiliki pekerjaan pagi hari tidak bersedia di transfer ke kelas pagi (reguler),
- 3) Siswa yang telah berada di kelas tinggi merasa bosan mengikuti pelajaran kelas rendah;
- 4) Siswa selalu merasa cepat bosan dan lamban menerima pelajaran,
- 5) Konsentrasi siswa masih labil dan sering cepat merasa terganggu,
- 6) Keinginan belajar masih rendah, kurang percaya diri sehingga sangat mengganggu dalam penyerapan pelajaran.

b). Berkaitan dengan Orang Tua Siswa

- 1) Kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak usia pendidikan dasar,
- 2) Tidak memilikinya tempat tinggal tetap sehingga sering pindah-pindah tempat tinggal yang dapat mengganggu pelaksanaan pembelajaran siswa,
- 3) Kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah

c). Berkaitan dengan Pengelola KLK

- 1) Materi pelajaran tidak terselesaikan sesuai jadwal,
- 2) Keberlanjutan pendanaan KLK di kelas reguler yang masih kurang,
- 3) Guru KLK yang tidak berasal dari sekolah penyelenggara menyulitkan koordinasi, terutama guru Non KLK,
- 4) Terbatasnya ruang kelas serta sarana olahraga yang tersedia,
- 5) Sulitnya menentukan penempatan siswa -siswa di kelas reguler

2). Solusi

Beberapa solusi yang telah dilakukan pengelola dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan KLK, antara lain:

1. Membuat peraturan dan penjelasan tentang pentingnya disiplin dalam belajar,
2. Melakukan kunjungan rumah bagi siswa yang tidak hadir dan memberikan penjelasan terhadap orang tua siswa ,
3. Memberikan dukungan dan memotivasi siswa melalui pendekatan secara sabar dan penuh kasih sayang,
4. Mengalokasikan berbagai bantuan dan berbagai sumber pendanaan pendidikan terutama BOS,
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua siswa akan pentingnya pendidikan,
6. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa .
7. Memberi kesempatan dan mengupayakan keterlibatan guru-guru non KLK,
8. Memberikan pengertian dan penjelasan secara transparan tentang keuangan kegiatan KLK

3). Harapan

Beberapa harapan dan saran yang diajukan guru dan kepala sekolah untuk perbaikan proses penyelenggaraan KLK dapat disarikan sebagai berikut:

- 1) Dana pendidikan siswa KLK yang telah masuk kelas reguler tetap di biayai sampai tamat sekolah dasar,
- 2) Program KLK tetap dipertahankan dan kesejahteraan pengelola KLK lebih ditingkatkan pada masa-masa mendatang,
- 3) Program KLK dapat dilaksanakan dengan baik tidak hanya 3 tahun tapi lebih dari itu sehingga terjadi proses yang berkesinambungan,

- 4) Dalam penentuan sekolah sesuai dengan tujuan pelaksanaan KLK maka pemilihan sekolah harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,
- 5) Perlu dikembangkan pelatihan bagi guru non KLK dalam pola penanganan siswa KLK di kelas reguler,
- 6) Perlu diupayakan semaksimal mungkin agar siswa KLK tidak mengalami putus sekolah kembali,
- 7) Perlu dikembangkan bentuk KLK bagi pendidikan sekolah lanjutan setara SMP.

Hal ini diungkapkan pula oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, melalui Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Harapan saya ke depan walaupun tanpa melalui KLK seperti ini kalau ada anak-anak yang drop out, semua sekolah itu langsung tanggap, kan begitu, ini kan karena kita kan program saja. Jangan sampai ada orang tua ataupun anak yang takut sekolah karena dia punya masalah. Walaupun tanpa KLK, sekolah tanggap, tanpa kita cari, tidak perlu lapor dinas, jangan sampai ada anak, orang tua menyebabkan tidak sekolah karena anak yang tidak sekolah pasti bermasalah, harapan saya seperti itu pendidikan dapat terwujud karena itu hak anak-anak. Harapan saya kedepan kepedulian terhadap anak-anak itu besar, terutama guru-guru. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Harapan Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang pelaksanaan program SD KLK, mengungkapkan bahwa:

“KLK tidak putus bagi penuntasan putus sekolah, Munculkan KLK tingkat SMP agar wajib belajar tuntas, supaya tidak terlantar lagi. Kesenambungan KLK SD ke SLTP”

“Anak-anak yg kurang mampu, dikawal sampai SMP, SMA, dan PT.”

“Pemerintah dapat mewadahi anak-anak yang memiliki kemampuan spesifik dapat terarahkan untuk membina anak-anak tersebut” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Sedangkan Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364 menyampaikan harapannya bagi pelaksanaan program SD KLK, seperti petikan wawancara berikut:

“Program ini akan berjalan terus karena melalui program ini anak-anak bisa mendapat kesempatan sekolah lebih tinggi.”

“KLK itu nantinya dapat menamatkan sekolah, dan anak-anak dapat belajar dengan senang, Ada hal-hal kecil yang perlu diperhatikan seperti gak punya rapor. Bantuan untuk anak-anak kurang, sehingga perlu pemikiran tentang penambahan biaya untuk anak-anak. Pemerintah gak mendanai operasional, yang APBD hanya transpor saja, pakaian anak-anak yang besar-besar gak muat sehingga diupayakan dari BOS, untuk beasiswa miskin perlu dipikirkan bagi anak-anak KLK”.

“Anak-anak KLK bisa masuk dalam pendanaan BOS karena sekarang ini kan kami nggak dapat Paket Bantuan Operasionalnya.” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Keempat, dari segi produk dalam pelaksanaan program SD KLK dapat dilihat berdasarkan aspek jumlah siswa di kelas reguler, tingkat adaptasi siswa di kelas reguler, dan prestasi siswa di kelas reguler. Tingkat keberhasilan program SD KLK, secara baik dapat ditinjau dari aspek penuntasan siswa dari putus sekolah sehingga dapat kembali mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Hal ini seperti diungkapkan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang keberhasilan program SD KLK di Kota Surabaya.

“Tingkat keberhasilan bukan jumlahnya, namun bagaimana lingkungan tersebut dari banyak DO menjadi tidak ada DO, sehingga memang menekan angka DO di lingkungan tersebut”.(Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Uraian hasil analisis terhadap dimensi produk dengan berbagai aspek disajikan sebagai berikut:

1) Jumlah siswa di kelas reguler

Pelaksanaan program SD KLK mampu mengantarkan siswa memasuki kelas reguler hingga dapat dipertahankan hingga lulus pendidikan dasar. Siswa -siswa tersebut secara umum dapat ditangani dengan baik oleh guru-guru di kelas reguler, karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan siswa lain di kelas reguler. Dilihat dari tingkat kehadiran mereka cukup tinggi kehadirannya, walaupun masih sesekali tidak hadir, namun selalu ada keterangan. Hal ini menunjukkan mereka telah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kelasnya dan keadaan tersebut menunjukkan mereka mampu bertahan hingga lulus.

Berdasarkan informasi pelaksana program SD KLK diketahui berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dialami siswa. Namun pada dasarnya dapat ditangani sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi. Secara umum masalah dialami siswa adalah masalah psikologis belajar. Dalam hal ini, guru memberikan solusi dengan sabar membantu siswa dalam pembelajarannya. Demikian juga bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar karena akibat kurang dapat mengikuti pelajaran serta akibat sulit bicara dan membaca. Sedangkan untuk mengatasi masalah siswa yang pernah DO kurang dari 1 tahun dilakukan dengan pemberian semangat bagi siswa untuk tetap belajar. Juga dilakukan pendekatan dengan memberi pengertian pada orang tua siswa agar selalu berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Pendekatan dengan orang tua siswa

dilakukan sewaktu ada pertemuan di sekolah atau dengan mendatangi rumah siswa yang bermasalah. Masalah lain yang dihadapi siswa KLK akibat kurang mampunya orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya akibat kondisi ekonomi. Pada umumnya guru dapat mengatasi masalah yang terjadi bagi siswa yang bermasalah pada sekolahnya.

Ada anak namanya Irwan, sebenarnya dia mampu, Cuma karena badannya besar jadi dia malu, kalau ke sekolah pakai jaket, nggak pede. Sudah DO kurang lebih satu tahun, kelas 5, sehingga dia hanya tinggal di rumah nggak ada kegiatan, kita ajak Alhamdulillah dia mau, ya Cuma itu kita harus terus memberikan motivasi. Ada anak namanya Ajeng, cerdas, sudah kita regularkan tapi sayang dia mesti bekerja membantu nafkah orang tuanya. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

2) Tingkat adaptasi siswa KLK dalam Kelas Reguler

Secara umum siswa program SD KLK dapat menyesuaikan diri dengan siswa reguler setelah bergabung dalam satu kelas (kelompok belajar). Hal ini terjadi karena para siswa masih memiliki umur yang relatif muda (siswa SD) dan mudah bergaul satu sama lainnya. Siswa KLK ditempatkan pada kelas reguler dilakukan berdasarkan kemampuan akademisnya, dengan pertimbangan psikologis siswa.

Siswa KLK yang masuk kelas reguler masih terus dalam pengawasan guru KLK, agar dapat beradaptasi dengan siswa reguler dan dapat mengikuti pelajaran agar tidak tertinggal jauh dengan kemampuan siswa reguler. Pada umumnya kehadiran siswa KLK pada kelas reguler tidak mengganggu proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa KLK memiliki semangat yang kuat untuk menambah ilmu (belajar). Kemudian berdasarkan pendapat guru non KLK menunjukkan bahwa siswa KLK cukup disiplin dalam belajar sesudah masuk pada kelas reguler.

Demikian juga bila ditinjau dari segi psikologis lainnya seperti: ketekunan dalam belajar, motivasi belajar dan sikap serta tutur kata siswa KLK relatif baik dibandingkan dengan siswa reguler. Hal ini menunjukkan bahwa siswa KLK tidak tertinggal dibandingkan siswa reguler, bila diberi kesempatan untuk belajar. Bila ditinjau dari segi kemampuan akademis siswa KLK, berdasarkan pendapat guru non KLK menunjukkan bahwa kemampuan akademis siswa KLK sama dengan kemampuan siswa reguler. Dalam pengelolaan siswa KLK, hampir tidak ada hambatan yang dijumpai guru dengan memasukkan siswa KLK pada kelas reguler.

Kemarin aku datangkan ketua dewan pendidikan, kerjasama dengan Ansori yang menangani anak-anak gelandangan, rumah singgah, anak itu dulu pengamen saya sering mampir kesitu dulu sekedar membawakan nasi goreng, mengobrol, biar dekat. Anak itu sekolah terus sampai kuliah, walau kadang sering minjem duit ke saya, sekarang dia sudah jadi Guru, jadi sekarang saya suka minta tolong ke dia, mas aku di bantu ya, sampeyan agar memotivasi Guru-Guru biar semangat dalam mendidik. Guru-guru diajak ke rumah, dimotivasi, jadinya akrab, ada kegiatan keluarga, dia pinter nyanyi campur sari pinter, dia punya temen-temen pengamen. (Hasil wawancara dengan Eko Prastyoningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 10 Januari 2010).

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian bahwa untuk penilaian terhadap bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD menggunakan pendekatan evaluasi program model CIPP yaitu *Contex, Input, Proses, dan Product*. Berikut ini butir-butir penjelasan terkait penilaian terhadap implementasi program SD KLK di Kota Surabaya.

5.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun sekolah, secara berjenjang baik kepada pihak instansi terkait seperti DPRD, UPTD Kecamatan, maupun pihak sekolah pelaksana program SD KLK. Kegiatan sosialisasi bagi kepala sekolah dilakukan sekaligus dengan rekrutmen sekolah penyelenggara dengan melakukan tes (interview) kepada para kepala sekolah yang akan dipilih sebagai kepala sekolah pengelola tanpa mereka mengetahui bahwa mereka sedang diseleksi, serta untuk mengetahui kepedulian mereka terhadap pendidikan, anak-anak terlantar/anak-anak kurang beruntung.

5.2.2 Rekrutmen Siswa

Pada dasarnya dalam pelaksanaan rekrutmen siswa, Dinas Pendidikan tidak memberikan batasan untuk jumlah, asal siswa, dan tempat asal siswa. Dinas Pendidikan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar setiap siswa yang Drop Out bisa kembali ke sekolah. Sedangkan cara rekrutmen dilakukan secara luas melalui perangkat/ aparat pemerintahan : baik RT, RW, Kelurahan , Kecamatan sampai Walikota, bahkan anggota DPRD.

5.2.3 Dana Bantuan

Dana bantuan untuk program SD KLK dianggarkan dari APBD. Namun bantuan ini disampaikan kesekolah berupa Paket belajar lengkap (seragam, tas, sepatu, buku, alat tulis), sedangkan bagi guru dan kepala sekolah berupa transport.

Berkaitan dengan kebutuhan biaya terhadap siswa sekolah dasar kelas layanan khusus, khususnya yang ada di Kota Surabaya yang dibiayai menggunakan dana APBD Kota Surabaya masih banyak kekurangan dari kebutuhan biaya ideal yang dibutuhkan oleh sekolah dasar penyelenggara program kelas layanan khusus. Di dalam penyelenggaraan sekolah dasar kelas layanan khusus di Kota Surabaya,

bantuan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya hanya berupa honor pengganti transport bagi Kepala Sekolah dan Guru masing-masing sebesar Rp.25.000/hari. Idealnya sebagai siswa-siswa yang tertinggal pelajaran karena masalah ekonomi dan psikologis sosial maka seharusnya ada bantuan biaya yang mencakup makanan tambahan sebagai penunjang kecukupan gizi siswa, ada sarana prasarana berupa multi media maupun laboratorium bahasa, komputer maupun laboratorium pembinaan *life skill* sesuai minat dan bakat mereka yang bisa berguna bagi hidup mereka kelak sehingga bisa hidup mandiri tidak menjadi beban bagi orang lain.

5.2.4 Kurikulum

Dinas Pendidikan hanya memberikan arahan kepada Kepala Sekolah agar mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat kelasnya anak-anak. Kurikulum sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya mengikuti kurikulum yang berlaku pada sekolah regular, yaitu kurikulum dari Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, ditambah dengan *local content* (muatan daerah) yang sesuai dengan lingkungan dimana Sekolah Dasar Kelas Layana Khusus berada. Kurikulum yang ada di Sekolah Dasar wilayah perkotaan berbeda dengan kurikulum yang ada di lokasi pantai (nelayan) disesuaikan dengan psikologis anak. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang tematik dengan melihat kasus anak per anak lebih dahulu (penyebab drop outnya) bisa karena problem keluarga, ekonomi, kekerasan, pelecehan dan kasus lainnya.

5.2.5 Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program SD KLK, pada dasarnya adalah untuk mengembalikan anak drop out, dengan alasan berbagai faktor baik ekonomi, geografis, dan maupun keluarga untuk dapat kembali ke sekolah hingga menyelesaikan sekolahnya. Namun sesuai dengan misi pembangunan Kota Surabaya, menentukan tingkat keberhasilan melalui bagaimana agar disekitar sekolah tidak ada anak yang putus sekolah. Jadi tingkat keberhasilan program ini tidak didasarkan pada

banyaknya sekolah merekrut siswa KLK tetapi berdasarkan jumlah siswa putus sekolah yang dituntaskan oleh sekolah penyelenggara (angka putus sekolah yang turun di sekitar lokasi sekolah).

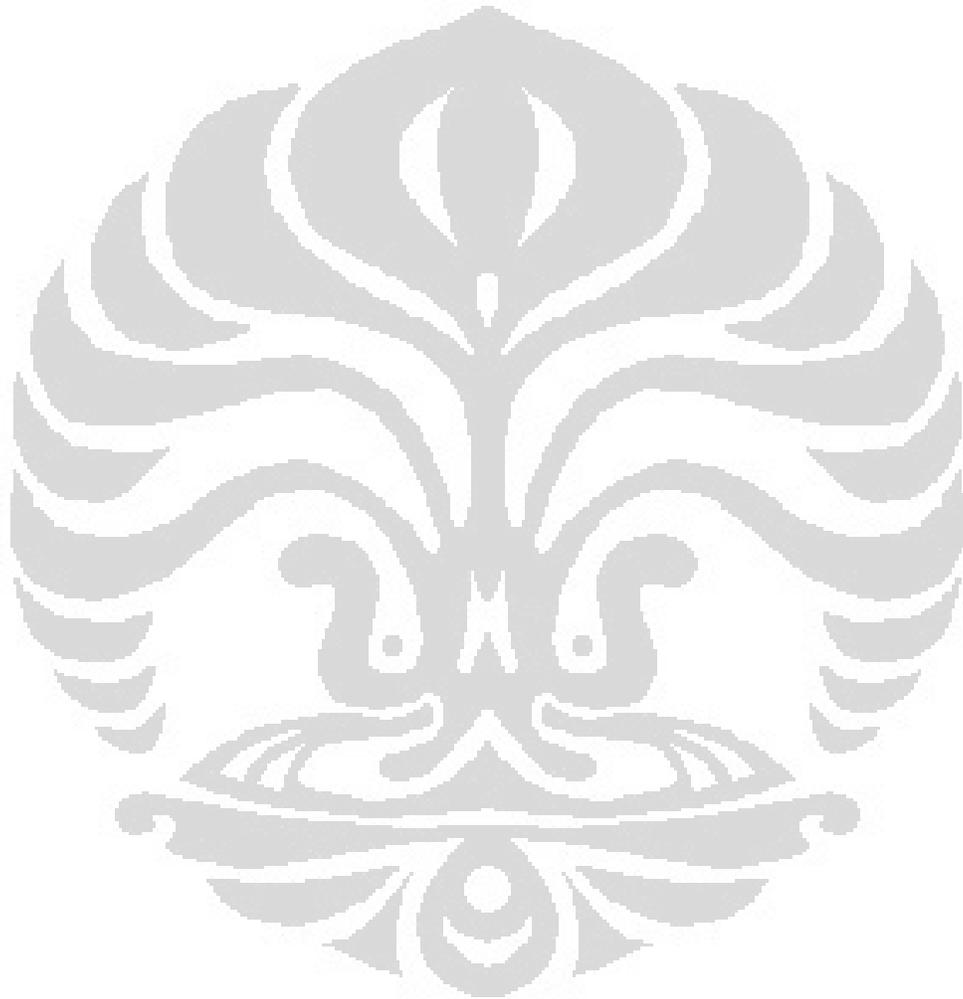
5.2.6 Hambatan

Program SD KLK di Kota Surabaya telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan menggunakan dana APBN, dan sejak tahun 2005 telah dicoba diaplikasikan melalui dana APBD. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program SD KLK ini, antara lain: hampir semua anak-anak KLK adalah anak-anak yang mengalami putus sekolah karena masalah ekonomi, kebanyakan dari mereka berasal dari masyarakat urban yang bermata pencaharian tidak tetap sehingga kebanyakan dari mereka diberdayakan oleh orang tua mereka untuk membantu mencari nafkah misalnya pada hari Kamis atau malam Jum'at biasanya anak-anak tidak masuk sekolah karena anak-anak pergi ke makam untuk menjadi pengemis musiman, menjual airyang di butuhkan oleh para peziarah, menjual bunga dan menjual untuk membersihkan maka bagi para peziarah. Hambatan lain adalah faktor lingkungan tempat tinggal mereka yang membuat mereka tidak sadar akan pentingnya pendidikan, misalnya lokasi SD Dupak adalah—disebutkan oleh Eko Prastyoningsih (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya- lokasi orang yg rombeng-rombeng (pemulung) sedangkan lokasi SD Banyuurip dekat pada lokalisasi pelacuran (PSK).

Adanya anggapan yang salah dari orang tua yang menganggap anaknya terlanjur bodoh sehingga menganggap percuma saja disekolahkan juga menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan model pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus. Banyak orang tua dari para siswa KLK tidak menganggap penting pendidikan bagi anak-anak mereka.

Solusi terhadap hambatan tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan terhadap para orang tua siswa KLK di Kota Surabaya agar pemahaman mereka bahwa apabila anak yang dianggap bodoh tadi tidak disekolahkan maka justru akan menjadi beban dikemudian hari. Sosialisasi atau pemahaman juga sering diberikan

pihak Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah, Guru-Guru KLK, aparat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat kepada orang tua siswa KLK agar mereka sadar bahwa pendidikan juga merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki nasib dan memperbaiki kehidupan.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis evaluasi pelaksanaan program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya yang telah diuraikan sebelumnya, sesuai pendekatan teori CIPP, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Program SD KLK telah meningkatkan motivasi dan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru untuk membantu siswa-siswa baik di kelas KLK maupun kelas reguler. Siswa program SD KLK di kelas reguler sebagian besar dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas reguler yang membuktikan tingkat adaptasi dan percaya diri mereka yang sudah pulih. Oleh sebab itu, siswa KLK di kelas reguler mampu bersaing dengan siswa - siswa lainnya. Pemilihan sekolah yang tepat sebagai tempat pelaksanaan program SD KLK di Kota Surabaya juga mendukung keberhasilan program ini. Kurikulum dan materi belajar yang diberikan, ditambah berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu para siswa KLK mengikuti pelajaran dengan baik. Kegiatan ekstra kurikuler yang diberikan juga dapat menciptakan kestabilan mental, sehingga rasa percaya diri anak-anak KLK juga kembali tumbuh dengan baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah guru KLK yang berjumlah 5 orang per sekolah merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya betul-betul menyeleksi langsung para Kepala Sekolah dan guru calon penyelenggara SD KLK sehingga terpilih para Kepala Sekolah dan guru yang

mempunyai kepedulian tinggi terhadap pentingnya pendidikan khususnya pendidikan bagi anak-anak kurang beruntung, sehingga walaupun biaya yang diberikan oleh pemerintah kota hanya sebatas pengganti transport bagi Kepala Sekolah dan Guru pelaksana program KLK mereka tetap semangat dalam melaksanakan model pendidikan ini. Kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Aparat Pemerintah membuat Program SD KLK di Kota Surabaya dapat berjalan dengan sangat baik. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan tes wawancara kepada para calon pengelola SD KLK sehingga sekolah yang direkrut betul-betul sekolah yang memahami dan peduli terhadap pendidikan. Rekrutmen siswa di setiap sekolah selain melibatkan guru KLK dan kepala sekolah, juga melibatkan aparat pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar sekolah.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program KLK yang sudah berjalan dengan baik ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelayanannya, juga ditingkatkan sebarannya sehingga anak-anak yang putus sekolah dasar dapat dilayani dengan baik, tidak hanya bagi anak-anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar namun juga bisa diimplementasikan pada jenjang yang lebih tinggi sehingga bisa menjadi program yang berkelanjutan. Para Kepala Sekolah dan guru KLK juga perlu diberi pelatihan dan workshop pembelajaran secara rutin sehingga mempunyai kemampuan membentuk aspek mental dan sosial bagi siswa-siswa KLK untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan mengantarkan siswa-siswa tersebut kembali ke kelas reguler dan lulus sekolah dasar.

2. Hampir semua siswa KLK putus sekolah karena persoalan ekonomi, kesadaran orang tua mereka sangat kurang terhadap pentingnya pendidikan sehingga perlu ada upaya untuk memberdayakan komite sekolah untuk membina para orangtua siswa KL, dengan begitu Kepala Sekolah dan para guru penyelenggara Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus dapat berkonsentrasi pada aspek pengajarannya. Dari segi aspek pembiayaan karena terbatasnya dana maka Pemerintah Kota Surabaya c.q Dinas Pendidikan Kota Surabaya perlu memperluas kerjasama pengelolaan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus dengan banyak pihak, misalnya dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan juga bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Komisi Perlindungan Anak karena permasalahan anak-anak KLK harus bisa ditangani secara *komprehensif* dan menyeluruh sehingga seluruh aspek masyarakat bisa lebih terlibat dan berpartisipasi pada pemerataan akses pendidikan.

REFERENSI

- Anderson, James E. 1978, *Public Policy Making*, Second Edition, New York Praeger Publishers
- Baker, ET., Wang, MC., & Walberg, HJ., 1995, The Effect of inclusion on learning. *Education Leadership*
- Depdiknas, 2010, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*, Jakarta: Depdiknas, 2010.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Second Edition, New Jersey
- Dye, Thomas R, 1972, *Understanding Public Policy*, New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice Hall
- Easten, David, 1985, *The Political System*, New York, Alfred A. Knopf
- Edward, George E and Ira Sharkansky, 1978, *The Policy Predicament*, San Fransisco, W.H. Freeman
- Friedrich, Carl. J, 1963, *Man and His Goverment*, New York, McGraw Hill
- Gerston, L.N, 1992, *Public Policy Making In A Democratic Society : A Guide To Civil Enggagement*, New York, M.E. Sharp Inc.
- Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995, *Studying Public Policy : Policy Cicles and Policy Subsystem*, New York, Oxford University Press
- Herry Widyastono, dkk. *Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus dan yang Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusbang Kurrandik Balitbang Depdikbud, 1997.
- Herry Widyastono. *Penyelenggaraan Sekolah Unggul: Landasan Yuridis, Filosofis, dan Konseptual*. Jakarta: Program Pascasarjana IKIP Jakarta, 1993.
- Jones, Charles O. 1984, *An Introduction to The Study of Public Policy*, Third Edition, Monterey Cole Publishing Company
- Lasswell, Harold. D and Abraham Kaplan, 1970, *Power and Society*, Yale University Press
- Joint Committee, 1991, *Standards for Evaluation of Educational Programs , Projects and Materials*
- Nasution, S. 1982, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bina Aksara, 1982
- Nasoetion, Andi Hakim. *Anak Berbakat dan Kemungkinan Menemukannya di Indonesia*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1982.

- Nakamura, R.T and F. Smallwood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, New York, St. Martin's Press
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia
- O'Neil, J, (1995) Can inclusion work? A Conversation with James Kauffman and mara Sapon-Shevin, *Education Leadership*,
- Parker, RS. 1975, *Policy and Administration in Australia: A reade*, Sydney, John Wiley and Sons
- Pressman, Jeffrey L. And Aaron Wildavsky, 1984, *Implementation How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*, Third Edition, California, University of California Press
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang MPR RI Periode 1999-2004*, Buku II Persandingan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi
- Stainback, William, 1992, *Contraversial Issues Confronting Special Education*, Allyn and Bacon: Simon&Schuster, Inc, USA.
- Staub, D dan Peck, C.A., 1995, What are the outcomes for nondisabled students?, *Education Leadership*,
- Suharsimi Arikunto, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sunardi, 2003, *Menuju Pendidikan Inklusif*, Bandung, Ditjen Dikti
- Stufflebeam, Daniel L and Anthony J. Shinkfield, 1984, *Systematic Evaluation : A Self Instructional*, Boston, Kluwer-Nijhoff
- Tayibnapis, Farida Yusuf, 2000, *Evaluasi Program*, Jakarta, Rineka Cipta
- Vaughn, S., Bos, C.S. & Schumn, J.S., 2000, *Teaching Exceptional, Diverse, and a Risk Student in the General Educational Classroom*, Boston: Allyn Bacon.
- Wardhani dan Julaeha, *Pemantapan Kemampuan Mengajar: Buku Materi Pokok*. (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2002), p. 32